

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
ESELON I PUSAT

004 01 2300 890615

Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2017 Audited

Jalan Udayana Nomor 22 Mataram Telp (0370) 6163333 Fax (0370) 6162999

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat adalah entitas akuntansi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 Audited mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mataram, 20 April 2018 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat

Wahyu Priyono NIP. 197006011991031002

DAFTAR ISI

				Halamar
Kata	a Pe	engantai	r	1
Daf	tar	lsi		ii
Daf	tar	Tabel		III
Daf	tar	Singkata	an	iv
Per	nya	taan Tar	nggung Jawab	vi
Ring	gka:	san		1
1.	La	poran R	ealisasi Anggaran	1
11.	Ne	eraca		1
111.	La	poran O	perasional	2
IV.	La	poran P	erubahan Ekuitas	3
V.	Ca	itatan at	tas Laporan Keuangan	4
	Α.	Penjela	asan Umum	9
		A. 1.	Dasar Hukum	9
		A. 2.	Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja BPK Perwakilan Provins	si 11
			Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat	
		A. 3.	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	19
		A. 4.	Basis Akuntansi	20
		A. 5.	Dasar Pengukuran	20
		A. 6.	Kebijakan Akuntansi	20
	В.	Penjela	asan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	34
		B. 1.	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	34
		B. 2.	Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	35
	C.	Penjela	asan atas Pos-Pos Neraca	41
		C. 1.	Penjelasan Umum Neraca	41
		C. 2.	Penjelasan Per Pos Neraca	41
	D.	Penjela	san atas Pos-pos Laporan Operasional	45
		D. 1.	Penjelasan Umum Laporan Operasional	45
		D. 2.	Penjelasan Per Pos Laporan Operasional	45
	E.	Penjela	san atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
		E. 1.	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	50
		E. 2.	Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
	F.	Pengur	ngkapan Penting Lainnya	53
		F. 1.	Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	53
		F. 2.	Pengungkapan Lain-lain	53
		F. 3.	Rekening Pemerintah	53
		F. 4.	Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan oleh KAP	53

VI. Lampiran A.1 serta Lampiran 1 – 34

DAFTAR TABEL

		الشج
55637 311110 571050		alaman
Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016	1
Tabel 2	Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2017 dan 2016	2
Tabel 3	Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2017 dan 2016	3
Tabel 4	Ringkasan Perubahan Ekuitas Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	3
Tabel 5	Penggolongan Kualitas Piutang	26
Tabel 6	Penggolongan Masa Manfaat Aset	30
Tabel 7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2017	34
Tabel 8	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2017	34
Tabel 9	Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2017	35
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2017 dan 2016	35
Tabel 11	Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2017	36
Tabel 12	Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program TA 2017	36
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2017 dan 2016	37
Tabel 14	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016	37
Tabel 15	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016	38
Tabel 16	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016	39
Tabel 17	Komposisi Perbandingan Neraca Per 31 Desember 2017 dan 2016	41
Tabel 18	Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2017 dan 2016	41
Tabel 19	Rincian Perbandingan Aset Tetap pada Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN per 31 Desember 2017	
Tabel 20	Komposisi Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2017 dan 2016	45
Tabel 21	Rincian Perbandingan Beban Opersional Tahun 2017 dan 2016	46
Tabel 22	Rincian Beban Persediaan Tahun 2017 dan 2016	46
Tabel 23	Rincian Beban Barang dan JasaTahun 2017 dan 2016	47
Tabel 24	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016	47
Tabel 25	Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Opersaional Tahun 2017 dan 2016	48
Tabel 26	Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 dan 2016	
Tabel 27	Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	50
Tabel 28	Rincian Rincian Perbandingan Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	
Tabel 29	Rincian Perbandingan Nilai Transaksi antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	52

DAFTAR SINGKATAN

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

ANAO : Australian National Audit Office

AusAID : Australian Agency For International Development

BMN : Barang Milik Negara

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BUN : Bendahara Umum Negara
CaLK : Catatan atas Laporan Keuangan
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA : Direktorat Jenderal Anggaran

DJKN : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

DPD : Dewan Perwakilan Daerah
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KAP : Kantor Akuntan Publik

KDP : Konstruksi Dalam Pengerjaan

KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPKNL : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

KUN : Kas Umum Negara

LBMN : Laporan Barang Milik Negara LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

LK : Laporan Keuangan

LKPP/LKKL : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga

LN : Luar Negeri

LRA : Laporan Realisasi Anggaran

MA : Mata Anggaran

MAK : Mata Anggaran Keluaran

NTPN : Nomor Transaksi Penerimaan Negara

PMK : Peraturan Menteri Keuangan PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Pusdiklat : Pusat Pendidikan dan Latihan

Renstra : Rencana Strategis

RKA : Rencana Kegiatan dan Anggaran

RKAKL : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

RKP : Rencana Kerja Pemerintah

RM : Rupiah Murni

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah SAIBA : Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik

Negara

SAI : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi SAK : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan

Satker : Satuan Kerja

SDM : Sumber Daya Manusia Setjen : Sekretariat Jenderal SS : Sasaran Strategis

SSBP : Surat Setoran Pendapatan Bukan Pajak SSPB : Surat Setoran Pengembalian Belanja

TA : Tahun Anggaran

TAB : Tahun Anggaran Berjalan TAYL : Tahun Anggaran Yang Lalu

TP/TGR : Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

TUP : Tambahan Uang Persediaan

UAKPA : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UAKPB : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

UM : Uang Muka UP : Uang Persediaan

USAID : United State Agency International Development

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 20 April 2018 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat

Wahyu Priyono & NIP. 197006011991031002

Pernyataan Tanggung Jawab – Halaman vi

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, hibah, dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017.

Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp7.947.958.000,00.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2017 seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari Estimasi Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara TA 2017 adalah sebesar Rp7.395.038.733,00 atau mencapai 93,04% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Transaksi Kas yang seluruhnya berasal dari Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016 (Dalam Rupiah)

	TA	2017		TA 2016
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah				Ď.
JUMLAH PENDAPATAN & HIBAH	•			
Belanja Transaksi Kas				
Belanja Rupiah Murni	7.947.958.000	7.395.038.733	93,04	7.228.697.839
Belanja Pinjaman dan Hibah	3	100		*
Belanja Transaksi Non Kas				
Belanja Barang Non Kas				
JUMLAH BELANJA	7.947.958.000	7.395.038.733	93,04	7.228.697.839

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

dana per 31 Desember 2017 dan dibandingkan dengan posisi keuangan entitas per 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00, Aset Tetap sebesar Rp0,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

Akun	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Nilai Kenaikan (Penurunan)	%
Aset				
Aset Lancar	-		(4)	0,00
Aset Tetap				0,00
Piutang Jangka Panjang		-		0,00
Aset Lainnya	-		-	0,00
Jumlah Aset		-	-	0,00
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek		1.0		0,00
Jumlah kewajiban			2.1	0,00
Ekuitas				
Ekuitas	-		-	0,00
Jumlah Ekuitas	-			0,00
Jumlah Kewajiban dan				
Ekuitas Dana			2	0,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.395.742.727,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp7.395.742.727,00.

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp703.994,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp7.395.038.733,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3
Ringkasan Laporan Operasional
Tahun 2017 dan 2016

(Dalam I	Rupial	n)
----------	--------	----

Jumi	ah I	Kenaikan (Pend	ırunan)
2017	2016	Jumlah	%
7.395.742.727	7.225.663.687	170.079.040	2,35
(7.395.742.727)	(7.225.663.687)	(170.079.040)	2,35
		-	-
		-	
703.994	(3.034.152)	3.738.146	(123,20)
703.994	(3.034.152)	3.738.146	(123,20)
		-	-
		-	
(7.395.038.733)	(7.228.697.839)	(166.340.894)	2,30
	2017 7.395.742.727 (7.395.742.727) - - - 703.994	7.395.742.727 7.225.663.687 (7.395.742.727) (7.225.663.687) 703.994 (3.034.152) 703.994 (3.034.152)	2017 2016 Jumlah 7.395.742.727 7.225.663.687 170.079.040 (7.395.742.727) (7.225.663.687) (170.079.040)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp0,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp7.395.038.733,00 kemudian ditambah dengan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.395.038.733,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp0,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4 Ringkasan Perubahan Ekuitas Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

	Jum	nlah	Kenaikan (Penuru	inan)
	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Jumlah	%
EKUITAS AWAL			-	
SURPLUS/DEFISIT LO	(7.395.038.733)	(7.228.697.839)	(166.340.894)	2,30
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	•			352
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR Penyesuaian Nilai Aset	-			
Koreksi Nilai Persediaan				
Selisih Revaluasi Aset Tetap		×		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		1.0		
Lain-lain				
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7.395.038.733	7.228.697.839	166.340.894	2,30
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.00		
EKUITAS AKHIR	100			

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara diakui berbasis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 20	17	% thd Angg	TA 2016	
	GIAIA	ANGGARAN	REALISASI	76 trid Arigg	REALISASI	
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1	-	-	0,00		
JUMIAH PENDAPATAN				0,00		
BELANJA	B.2.2					
Belanja Operasi						
Belanja Pegawai	B.2.2.1	-		0,00		
Belanja Barang	B222	7.947.958.000	7.395.038.733	93,04	7.228.697.839	
Jumlah Belanja Operasi		7.947.958.000	7.395.038.733	93,04	7.228,697,839	
Belanja Modal	B.2.2.3					
Belanja Tanah	B2.2.3.1	-		0,00		
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.2.3.2	-	-	0,00		
Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.2.3.3	-	-	0,00		
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.2.2.3.4		-	0,00		
Belanja Modal lainnya	B2.23.5			0,00		
Jumlah Belanja Operasi	F		-	0.00		
ALVALEE HALMUL		7.947.958.000	7.395.038.733	93,04	7.228.697.839	

NERACA

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT NERACA

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
ASET			
ASETLANCAR	C.2.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	G2.1.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C2.1.2		
Belanja Dibayar di Muka	C2.1.3		
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C2.1.4		
Plutang Bukan Pajak	C2.1.5	*	
Penyisihan Plutang Tidak Tertagih – Plutang Bukan Pajak	C2.1.6	HOLDER TO SERVE	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C2.1.7		
Penyisihan Plutang Tak Tertagih - Plutang Jangka Pendek	C2.1.8		
Persediaan	G2.1.9		
Jumlah Aset Lancar			
ASET TETAP	C2.2		
Tanah	C2.2.1	The state of the	
Peralatan dan Mesin	C2.2.2		
Gedung dan Bangunan	C2.2.3		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C2.2.4		
Aset Tetap Lainnya	C2.2.5		
Konstruksi dalam pengerjaan	C2.2.6		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C2.2.7		
Jumlah Aset Tetap			
PIUTANG JANGKA PANJANG	C2.3		
Tagihan TP/TGR	C2.3.1		
Tagihan Penjualan Angsuran	C2.3.2	The state of the s	THE STATE OF THE
Penyisihan Plutang Tak Tertagih - Plutang Jangka Panjang	C2.3.3		
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
ASETLAINNYA	G2.4		
Aset Tak Berwujud	C2.4.1		
Aset Lain-Lain	C2.4.2		
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C2.4.3		
Jumlah Aset Lainnya			
JUMLAH ASET			
KBWA JBAN	10102	Marie San Galli	
KEWAJBAN JANGKA PENDEK	G2.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	G2.5.1		Marie Total
Pendapatan Diterima di Muka	C2.5.1		
Uang Muka dari KPPN	G2.5.2		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	U.2.5.5		
JUMLAH KEWAJBAN			
EKUITAS		MED TO SELVE	
Buitas	026		NAME OF THE PARTY
	G2.6	*	
JUMLAH EKUITAS			
JUMLAH KEWAJBAN DAN BRUITAS			-

LAPORAN OPERASIONAL

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1		
JUM LAH PENDAPATAN		•	
BEBAN	D.2.2		
Beban Pegawai	D.2.2.1		
Beban Persediaan	D.2.2.2	73.642.229	110.040.880
Beban Barang dan Jasa	D.2.2.3	1.287.624.145	1.152.908.303
Beban Pemeliharaan	D.2.2.4		-
Beban Perjalanan Dinas	D.2.2.5	6.034.476.353	5.962.714.504
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.2.6		
Beban Penyisihan Plutang Tak Tertagih	D.2.2.7		
Beban Lain-lain	D.2.2.8		
JUM LAH BEBAN		7.395.742.727	7.225.663.687
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7.395.742.727)	(7.225.663.687)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2.3		
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar			
Surplus/ (Defisit) Penyelesalaan Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainya		703.994	(3.034.152)
SURPLUS/ DEFIST DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		703.994	(3.034.152)
SURPLUS DEFISIT SEBELUM POSILIAR BIASA		(7.395.038.733)	(7.228.697.839)
POSILIAR BIASA	D.2.4		
Pendapatan Luar Biasa			
Beban Luar Basa		and the same in	
SURPLUS DERISTLO		(7.395.038.733)	(7.228.697.839)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
BUITASAWAL	E2.1	-	
SURPLUS DETIST LO	E2.2	(7.395.038.733)	(7.228.697.839)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN			
BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	E2.3		
MENDASAR	A STATE OF		
Penyesuaian Nilai Aset	E2.3.1		
Koreksi Nilai Persediaan	E2.3.2	-	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E2.3.3		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E2.3.4		
Koreksi Lain-lain	E2.3.5		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E2.4	7.395.038.733	7.228.697.839
BUITASAKHIR	E2.5		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.
- 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana terlah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- 28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga.

- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
- A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT
- A.2.1 PROFIL SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap Ibukota Provinsi. Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat adalah satuan kerja vertikal BPK yang berkududukan di Kota Mataram.

- 1. Lingkup Tugas
 - Lingkup tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup tiga jenis pemeriksaan, terdiri dari:
 - (1) Pemeriksaan keuangan; yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
 - (2) Pemerikaan Kinerja; yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD.
 - (3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT); yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

2. Organisasi BPK

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu, (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan

Profil

keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjenan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam SK BPK No.3/K/I-XIII.2/7/2014 sebagaimana telah diubah empat kali dengan perubahan pertama SK BPK No.1/K/I-XIII.2/2/2016; perubahan kedua SK BPK No.10/K/I-XIII.2/11/2016; perubahan ke tiga SK BPK No.13/K/I-XIII.2/12/2016 dan perubahan ke empat SK BPK No.14/K/I-XIII.2/9/2017.

3. Pegawai BPK

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Status Pegawai BPK adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pola rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada Renstra 2016—2020, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

4. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, antara lain:

- a) Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan DPRD;
- b) Pemerintah, yaitu instansi pemerintah Pusat/Daerah yang diperiksa (auditee);
- c) Instansi penegak hukum;
- d) Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- e) Organisasi kemasyarakatan dan profesi; dan
- f) Warga Negara Indonesia.

A.2.2 RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA Rencana Strategis TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT

Rencana Strategis
BPK

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat adalah satuan kerja vertikal BPK, maka Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat menginduk Renstra Lembaga BPK.

Renstra BPK Tahun 2016 - 2020 adalah sebagai berikut:

1. Visi

"Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat".

2. Misi

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

3. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya BPK menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Integritas; bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- b. Independensi; bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi.
- c. Profesionalisme; dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada struktur yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

Melalui pelaksanaan misinya, BPK berupaya untuk mencapai tujuantujuan strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara;
- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

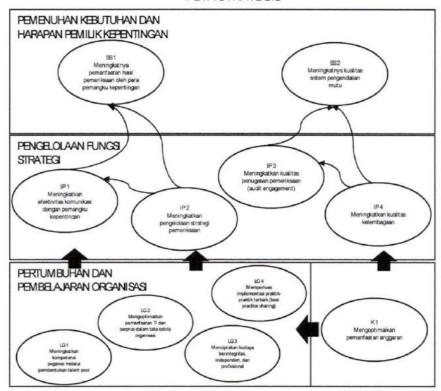
5. Sasaran Strategis

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BPK menetapkan sepuluh sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan (SS₁);
- b. Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu (SS₂).

Dalam mencapai sasaran strategis (SS), maka diidentifikasikan prosesproses internal atau *Internal Process* (IP) di BPK yang dianggap signifikan dalam mengungkit tercapainya tujuan strategis. Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu disediakan dukungan modal organisasi, pertumbuhan dan pembelajaran organisasi atau *Learning* and *Growth* (LG) yang terdiri dari sumber daya manusia, teknologi informasi, budaya organisasi serta manajemen pengetahuan.

PETA STRATEGIS



6. Indikator Kinerja Utama BPK

Untuk mewujudkan visi dan misi BPK melalui tujuan strategis dan sasaran strategis, ditetapkan ukuran keberhasilan dalam jangka waktu lima tahun yaitu berupa Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat sebagai berikut:

	Sasaran Strategis		INDIKATORKINERIA	TARGE
SS1	Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan	1.1	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%
SS2 SS3 SS4		1.2	Persentase Penyampai an LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
		1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%
		1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
		1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
SS1 Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeri ksaan SS2 Meningkatnya kualitas perencanaan pemeri ksaan SS3 Meningkatnya kualitas pemeri ksaan SS3 Meningkatkan kualitas hasil pemeri ksaan SS4 Meningkatkan kualitas pemantauan TLR-IP dan Kerugian Negara SS5 Meningkatkan kualitas pemantauan TLR-IP dan Kerugian Negara SS6 Meningkatkan kualitas pemantauan TLR-IP dan Kerugian Negara SS6 Meningkatkan kualitas pemantauan TLR-IP dan Kerugian Negara SS7 Meningkatkan kualitas pemantauan TLR-IP dan Kerugian Negara SS8 Meningkatkan kualitas pemantauan TLR-IP dan Kerugian Negara SS7 Meningkatkan kualitas pemantauan TLR-IP dan Kerugian Negara SS8 M	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%		
		2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20
\$\$3		3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%
		3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%
		3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%
SS2 SS3 SS5		3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70
		3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		3.6	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%
\$\$4		eningkatkan kualitas 4.1 Tingkat Kemutahiran Data Tindak I mantauan TLPHP dan Kerugian Hasil Pemeriksaan	Tingkat Kemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	Negara	4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22
		4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
\$\$5		5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara	Α
		5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	70%
SS3 SS4 SS5		5.3	Jumlah usulan best-practice	0
		5.4	Persentase penyebaran best-practice	0%
		5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	100%
		5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%
		5.7	Jumlah media relation yang dilaksanakan	2
		5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%
		5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Bik dan Peraturan Disiplin	100%
SS6	Meningkatkan kompetensi pegawai	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
		6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%
S 57	Meningkatkan Kinerja Anggaran	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	82%

Matrik hubungan antara tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama yang digunakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan Strategis		Sasaran Strategis	Nama IKU
Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan	SS1	Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan	Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan Dan Kebutuhan Pemangku
keuangan negara untuk mencapai tujuan negara			Kepentingan Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
	IP1	Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan	Tingkat Pemenuhan
		Rependingan	Pendapat BPK yang Diterbitkan
			Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Kumunikasi
	IP2	Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan	Presentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan
			Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
			Presentase Pemeriksaan Kinerja Tingkat Kemutahiran Data
			Tindak Lanjut Pemeriksaan
Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan	SS2	Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu	Presentase LHP yang digugat dan BPK dinyatakan kalah Indeks Kepuasaan Auditee
keuangan negara untuk mencapai tujuan negara			Atas Kinerja Pemeriksa BPK Indeks Mutu Organisasi Nilai <i>Quality Assuranc</i> e
			Reformasi Birokrasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja
	IP3	Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan (audit engagement	Pemenuhan Quality Assurance dan Quality Control
			Presentase Penyeselesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPF
	IP4	Meningkatkan kualitas	Tingkat Evaluasi atas LHP
	IP4	kelembagaan	Presentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Peer Review
			Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan Perundangan Terkait Tugas
			dan Wewenang BPK Tingkat Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK
	LG1	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui	Presentase Pemenuhan Talent
	100	pembentukan talent pool	Indeks Kepuasan Pegawai
	LG2	Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras	Presentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi
		dalam tata kelola organisasi	Presentase Pemanfaatan TI Tingkat Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan
	100	Manaintaken hudaus	Sarpras
	LG3	Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional	Tingkat Pemahanan Pegawai Terhadap Visi, Misis, dan Nilai Dasar BPK
			Tingkat Implementasi Nilai Dasar BPK Pelangggaran Kode Bik dan
	IGA	Memperluas implementasi	Disiplin Pegawai Penyusunan Best Practice
	234	praktik-praktik terbaik (best	Penyebaran Best Practice
	K1	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran	Tingkat Kinerja Anggaran

7. Lingkungan Strategis BPK

Lingkungan strategis BPK meliputi nasional dan lingkungan strategis internasional. Lingkungan strategis nasional meliputi antara lain tantangan bangsa Indonesia dan agenda pembangunan serta harapan pemangku kepentingan. Lingkungan strategis internasional yaitu aktif di dalam kegiatan organisasi lembaga pemeriksa sedunia atau International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), pada tingkat Asia atau The Asian Organisation of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) dan pada tingkat ASEAN atau ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI).

A.2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BPK

Program dan Kegiatan BPK

Di dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Nasional tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan dan acuan RPJP Daerah.

RPJMN tersebut memuat antara lain strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga (KL) dan lintas KL, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. RPJMN tersebut dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Selanjutnya, RKP disusun berdasarkan RPJM. Dokumen perencanaan RPJM dan RKP tersebut menjadi dasar penyusunan Renstra KL. Renstra KL tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan KL dan bersifat indikatif. Renstra KL tersebut menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan KL yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Sebagai lembaga negara, BPK melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan SPPN. Untuk itu, dokumen anggaran, khususnya RPJP dan RPJM Nasional, menjadi pertimbangan penyusunan Renstra BPK. Selanjutnya, Renstra BPK tersebut menjadi acuan penyusunan Renja BPK dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK sebagai dokumen anggaran tahunan BPK.

BPK telah berhasil menyusun Program dan Kegiatan BPK yang telah digunakan dalam Renja BPK Tahun 2016 dan penganggaran (RKAKL/DIPA) Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM	GENERIK (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI SETJEN (004.01)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK RI
1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama
1033	Manajemen SDM
1034	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
5644	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK RI
1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK RI
1036	Pengawasan oleh Inspektorat
PROGRAM	TEKNIS (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI BPK PUSAT (004.02)
06	Program Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah. Pengembangan dan Pelayanan Hukum d Bidang Pemeriksa Keuangan Negara
1037	Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah
1038	Pelayanan Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum
07	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan. Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara
1039	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
1040	Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan
08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Selanjutnya dari program-program tersebut dijabarkan menjadi kegiatankegiatan dengan pembagian Satuan Kerja (satker) sebagai berikut:

PROGRAM GENERIK DI KANTOR PUSAT (DIPA SETJEN)

PROGRAM/ KEGIATAN

KODE

1036

1. Satuan Kerja di Kantor Pusat

UNIT ESELON I /

Inspektorat Pemerolehan

2 Internal dan Mutu Kelembagaan

Keyakinan Mutu Pemeriksaan Inspektorat Pemeriksaan

Inspektorat Penegak Integritas

UNIT ESELON II Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK
Pelayanan Kesekretariatan, kehumasan dan 1 Biro Sekretariat Pimpinan 2 Biro Humas dan Kerja Sama Internasional 3 Biro Sumber Daya Manusia kerjasama 1033 Manajemen SDM 4 Biro Keuangan 1034 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Jenderal 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK 1 Biro Teknologi Informasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum 1035 2 Biro Umum 03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK Ri Pengawasan oleh Inspektorat

DDCCCDAM	TEMBLEDI	MANITOD DI ICAT	(DIPA BPK PUSAT)	
LLPCOLAMINI	I DAMIS DI	MINIORFUSAI	DIFA DEN FUSATI	

UNIT ESELON I/ UNIT ESELON II Ditama Binbangkum		KODE	PROGRAM/ KEGIATAN Program Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	
		KODE		
		06		
1	Direktorat KHKKN/D	1037	Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Negara/Daerah	
2	Direktorat LPBH	1038	Pelayanan Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum	
Dita	ima Revbang	07	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan. Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	
1	Direktorat PSMK	1039	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	
2	Direktorat EPP	1040	Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan	
3	Direktorat Litbang	1041	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara	
AKI	I s.d. VII	80	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	
1	Auditorat	1043	Pemeriksaan Keuangan Negara	

2. Satuan Kerja di Balai Diklat/Pusdiklat/Perwakilan

PROGRAM GENERIK DAN TEKNIS DI PUSDIKLAT

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DI PUSDIKLAT		
PROGRAM GENERIK (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI SETJEN (004.01)			
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK RI		
1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama		
1033	Manajemen SDM		
1034	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara		
5644	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara		
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK RI		
1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum		

PROGRAM GENERIK DAN TEKNIS DI PERWAKILAN

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DI PERWAKILAN		
PROGR	RAM GENERIK (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI SETJEN (004.01)		
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK RI		
1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama		
1033	Manajemen SDM		
1034	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara		
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK RI		
1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum		
PROGR	AM TEKNIS (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI BPK PUSAT (004.02)		
07	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara		
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara		

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A. 4. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A. 5. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pedapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK adalah sebagai berikut:

- o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan dari Pemindah Tanganan BMN diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan Pelunasan ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara diakui saat dikeluarkannya surat keputusan TP/TGR atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Pada setiap akhir periodetahun anggaran, seluruh Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya pada satuan kerja Eselon I BPK Pusat telah ditransfer keluar ke satuan kerja Eselon I Setjen.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini, meliputi:

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri atas:
 - Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara

CaLK Pendahuluan – Halaman 22

Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari:

- Pendapatan yang belum Disetor

Pendapatan negara yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor pegawai, TKPK serta gaji), jasa giro, penerimaan PNBP, dan lain-lain yang belum disetorkan.

Khusus untuk Pengembalian Belanja tahun berjalan yang belum disetor, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Utang kepada pihak ketiga yang berada pada Bendahara Pengeluaran yaitu berupa Honor, gaji/TKPK, uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai, serta uang lainnya yang yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya pada tanggal Neraca.

Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

- Utang Jangka Pendek Lainnya

Pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan disisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.

Belanja dibayar dimuka (prepaid)

Belanja dibayar dimuka (prepaid) BPK berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitasnya dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

Belanja dibayar dimuka BPK berasal dari realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan. Belanja dibayar di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar.

Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Dimuka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang pada BPK berasal dari Piutang Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Akun Piutang Bukan Pajak perlu diidentifikasi apakah masuk dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau Piutang PNBP dengan kebijakan yaitu:

Pendapatan yang masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yaitu:

- Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi atau tidak melalui penetapan.
- Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

BPK tidak mempunyai akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

➤ Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang Bukan Pajak pada BPK terdiri atas:

- Piutang PNBP adalah pendapatan PNBP tahun berjalan

yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum diterima pembayarannya.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang PNBP yaitu:

- 1) Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat Penetapan/Yang Dipersamakan.
- Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- 3) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Piutang PNBP pada BPK berasal dari Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca, kelebihan pembayaran belanja modal karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan (yang dibayar melalui jaminan/Bank Garansi).

- Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya berasal dari:
 - Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas; serta
 - Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.
 Kebijakan akuntansi untuk Piutang Lainnya adalah:
 - a) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya melainkan saat penyetoran ke Kas Negara.
 - b) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Penogolongan Kualitas Piutang

Kualitas Plutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%	
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%	
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%	
	Rutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Rutang Negara/DJKN		

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dalam kondisi baik yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, beban persediaan hanya diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan belanja bantuan sosial. Untuk persediaan yang bersifat umum, beban persediaan tahun berjalan termasuk didalamnya persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang. Walaupun secara fisik persediaan masih ada tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Apabila saldo persediaan akhir yang sebelum opname fisik nilainya lebih besar dari hasil opname fisik maka dicatat sebagai pengurang Persediaan.

Nilai Persediaan pada satker Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat tetap disajikan jika terdapat anggaran Belanja Persediaan dan Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) serta tempat yang mengelola Persediaan. Jika tidak terdapat UAPKPB dan tempat pengelola Persediaan, tetapi memiliki anggaran, maka dilakukan transfer ke satker Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa

Tenggara Barat Eselon I Pusat.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Akibat dari penerapan kebijakan kapitalisasi aset tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016, data BMN menjadi terbagi dua, yaitu:

- Daftar BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/ Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.
- Daftar BMN Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK terjadi karena 3 hal, yaitu:

Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L (BPK).

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK Perwakilan Provinsi/Pusdiklat BPK);

Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain.

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain;

Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaanya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

 Renovasi aset tetap milik Instansi pemerintah lainnya (Pemda) dan Renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain).

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan (dari

kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. mengetahui potensi BMN dengan memperkitakan sisa Masa manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah:
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
- d. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan;
- e. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
- f. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya Nilai Residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara

umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Masa Manfaat
2 s.d. 20 tahun
10 s.d. 50 tahun
5 s.d. 40 tahun
4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya meliputi:

Aset Tak Berwujud meliputi software, lisensi, serta Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.

Pada Aset Lainnya–Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi mulai Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No. 620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

- o Software Komputer masa manfaat 4 tahun
- o Lisensi masa manfaat 10 tahun;
- o Franchise masa manfaat 5 tahun;
- Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I masa manfaat 70 tahun;
- o Hak Paten Sederhana masa manfaat 10 tahun;
- o Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II masa manfaat 50 tahun;
- o Paten Biasa masa manfaat 20 tahun;
- o Merek masa manfaat 10 tahun.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas dan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban 6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

o Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK terdiri dari:

- Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari:
 - Belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal; dan
 - ➤ Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/Lembaga/ pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/ komitmen tersebut. Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban laporan operasional, tetapi

bersamaan dengan pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset yang diperoleh. Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban.

Pada saat pembayaran belanja yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.

- Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan Diterima Dimuka di BPK antara lain berupa Pendapatan Sewa Diterima Dimuka. Pendapatan Sewa Diterima di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga.
- Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.
- Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

o Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7 Fkuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban

dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penilaian Kembali BMN

8. Penilaian Kembali BMN

Penilaian Kembali BMN adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu.Penilaian Kembali BMN dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 s.d 2018.

Objek Penilaian kembali adalah BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015 yang meliputi:

- Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Penilaian Kembali BMN dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal berupa:

- 1. Tanah dan/atau bangunan; dan
- Selain tanah dan/ atau bangunan untuk penyusunan neraca Pemerintah Pusat dan pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian BMN dilakukan untuk:

- a) Penyusunan neraca Pemerintah Pusat;
- b) Pemanfaatan;
- c) Pemindahtanganan; atau
- d) Pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain Surat Berharga Syariah Negara.

Penilaian Kembali BMN dilaksanakan untuk mendapatkan Nilai Wajar Atas BMN.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Umum LRA berikut:

Penjelasan Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja TA 2017 adalah sebagai

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Realisasi Pendapatan Negara dan			-
	Hibah	-	-	-
	a. Penerimaan Pajak			
	b. PNBP	-		
	c. Hibah	-	*	
2	Realisasi Belanja Negara	7.947.958.000	7.395.038.733	93,04
	- Belanja Rupiah Murni	7.947.958.000	7.395.038.733	93,04
	- Belanja Pinjaman LN			
	-Belanja Rupiah Pendamping			
	-Belanja Hibah LN			
	-Belanja Barang Non Kas			

Selama periode TA 2017, Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari penetapan awalnya. Hal ini disebabkan adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan estimasi pendapatan dan anggaran belanja TA 2017 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 8 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah		
	a. Penerimaan Pajak		-
	b. PNBP	-	-
	c. Hibah	-	
2	Realisasi Belanja Negara	7.947.958.000	7.947.958.000
	- Belanja Rupiah Murni	7.947.958.000	7.947.958.000
	- Belanja Pinjaman LN		-
	-Belanja Rupiah Pendamping		
	-Belanja Hibah LN		
	-Belanja Barang Non Kas		

(Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 1)

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. PENDAPATAN

Realisasi Realisasi Pendapatan pada TA 2017 adalah sebesar Rp0,00 atau Pendapatan mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00 juta Rp0,00. Pendapatan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain.

> Rincian estimasi dan realisasi pendapatan dan hibah TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2017

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Staan (42311)	-		0,00%
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42312)		-	0,00%
3	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42314)	-	-	0,00%
4	Pendapatan Jasa II (42322)			0.00%
5	Pendapatan Denda (42375)		-	0.00%
6	Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL (42391)	-	-	0,00%
7	Pendapatan Pelunasan Piutang (42392)	-		0,00%
	Jumlah		-	0,00%

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2017 dan2016

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	TA 2017	TA 2016	Kenaikan / (penurur	nan)
140.	Ordianti endapatan or moan	1A2017	1A 2010	Rp	%
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Staan (42311)			-	0,00%
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42312)	-		•	0,00%
3	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42314)	•	-	-	0,00%
4	Pendapatan Jasa II (42322)	-	-	-	0,00%
5	Pendapatan Denda (42375)		-	-	0,00%
6	Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL (42391)	-	#i		0,00%
	Jumlah	0	0	0	0,00%

(Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 4,5)

B.2.2. BELANJA

Belanja Negara Rp7.395,04 juta

Realisasi Belanja TA 2017 adalah sebesar Rp7.395.038.733,00 atau Belanja 93,04% dari anggaran belanja sebesar Rp7.947.958.000,00. Rincian Negara anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2017

(dalam Rupiah)

		TA	2017	
Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	-	-	0,00
52	Belanja Barang	7.947.958.000	7.613.438.590	95,79
53	Belanja Modal		-	0,00
	Total Belanja Kotor	7.947.958.000	7.613.438.590	95,79
	Pengembalian Belanja		218.399.857	0,00
	Jumlah	7.947.958.000	7.395.038.733	93,04

Sedangkan menurut program, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program TA 2017

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	%
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	-	-	0,00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	-		0,00
03	Program Pengawasan dan Penigkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	7.947.958.000	7.395.038.733	93,04
	Jumlah	7.947.958.000	7.395.038.733	93,04

Dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,30% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

100 m			TA 2016	Kenaikan / (Penurunan)	
Kode	Uraian Jenis Belanja	TA 2017		(Rp)	%
51	Belanja Pegawai				0,00
52	Belanja Barang	7.395.038.733	7.228.697.839	166.340.894	2,30
53	Belanja Modal	-			0,00
	Jumlah	7.395.038.733	7.228.697.839	166.340.894	2,30

Kenaikan realisasi belanja TA 2017 dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2016 disebabkan Kenaikan realisasi belanja barang terjadi karena pada dasarnya standar biaya umum naik, begitu pula nilai/harga barang seperti tiket dalam perjalanan dinas dalam negeri dan juga karena laju inflasi yang didorong oleh kenaikan BBM.

(Laporan Realisasi Anggaran Belanja dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 2,3)

B.2.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai adalah Rp0,00 dan realisasi Pegawai Belanja Pegawai TA 2017 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari alokasi Belanja Rp0,00 juta Pegawai yang dianggarkan.

> Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

> Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Kode	Hates	74 0047	T1 0045	Kenaikan / (Penurur	nan)
Akun	Uraian	TA 2017	TA 2016	Rp	%
5111	Belanja gaji & tunjangan PNS	-			0,00
5113	Belanja gaji & tunjangan pejabat negara				0,00
5121	Belanja Honorarium	-		-	0,00
5122	Belanja Lembur	-		-	0,00
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito				0,00
Realisas	si Belanja Bruto				0,00
	nbalian Belanja				0,00
Limlah	Netto	-			0,00

B.2.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang Pagu anggaran untuk Belanja Barang adalah Rp7.947.958.000,00 dan Rp7.395,04 realisasi Belanja Barang TA 2017 sebesar Rp7.395.038.733,00 atau juta 93,04% dari alokasi Belanja Barang yang dianggarkan.

> Realisasi belanja barang TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7.395.038.733,00 dan Rp7.228.697.839,00.

> Realisasi belanja sampai dengan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,30% dari TA 2016. Hal ini disebabkan standar biaya umum naik, begitu pula nilai/harga barang seperti tiket dalam perjalanan dinas dalam negeri dan juga karena laju inflasi yang didorong oleh kenaikan BBM. Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Kode	Livelen	TA 2047	TA 0040	Kenaikan (Penuru	nan)
Akun	Uraian	TA 2017	TA 2016	(Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	1.192.495.454	1.090.976.626	101.518.828	9,31
5212	Belanja Barang Non Operasional	95.128.691	61.931.677	33.197.014	53,60
5218	Belanja Barang Persediaan	72.938.235	113.075.032	(40.136.797)	(35,50)
5221	Belanja Jasa		-		-
5231	Belanja Pemeliharaan			-	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.252.876.210	6.311.750.864	(58.874.654)	(0,93)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri				0*
Jumlah	Belanja Bruto	7.613.438.590	7.577.734.199	35.704.391	0,47
Pengem	balian Belanja	218.399.857	349.036.360	(130.636.503)	(37,43)
Jumlah	Netto	7.395.038.733	7.228.697.839	166.340.894	2,30
Juli III di I	Hetto	7.555.050.755	7.220.037.033	100.540.054	

Realisasi Belanja Barang (52) TA 2017 yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	JUMLAH	Ro	-
3	Kapitalisasi pada ATB Lainnya	Rp	-
2	Kapitalisasi pada Software	Rp	
1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp	-

(Rincian Belanja Barang yang dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 32)

B.2.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal Pagu anggaran untuk Belanja Modal adalah Rp0,00 dan realisasi Belanja Rp0,00 juta Modal TA 2017 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari alokasi Belanja Modal yang dianggarkan.

> Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

> Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 adalah

sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	TA 2017	TA 2016	Kenaikan (Penurunan)		
Akun	Ordina IAZOTI	1A 2016	(Rp)	%		
5311	Belanja Modal Tanah	-		-	0,00	
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 11 28			0,00	
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120	-		0,00	
5361	Belanja Modal Lainnya		-	-	0,00	
Realisa	si Belanja Bruto		-		0,00	
engen	nbalian Belanja	-	-	-	0,00	
Lumlah	Netto		-	-	0,00	

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 sebesar Rp0,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

	JJMLAH	Rp	
3	Kapitalisasi pada Aset Tetap dalam Renovasi	Rp	
2	Kapitalisasi pada KDP	Rp	-
1	Kapitalisasi pada Tanah	Rp	

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2017 sebesar Rp0,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

	HAIMUL	Rp	
9	Tidak dikapitalisasi	Rp	-
8	Kapitalisasi Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	Rp	
7	Kapitalisasi pada Software	Rp	-
6	Kapitalisasi pada Aset Tetap dalam Renovasi	Rp	-
5	Kapitalsasi pada Aset Tetap Lainnya	Rp	-
4	Kapitalisasi pada Jaringan	Rp	
3	Kapitalisasi pada Irigasi	Rp	
2	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	Rp	-
1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp	-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2017 sebesar Rp0,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

	JJMLAH	Rp	
8	Tidak dikapitalisasi	₽p	-
7	Kapitalisasi Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	Rp	-
6	Kapitalisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	₽p	
5	Kapitalisasi pada Aset Tetap Renovasi	₽p	
4	Kapitalisasi pada Jaringan	Rp	-
3	Kapitalisasi pada Jalan dan Jembatan	Rφ	
2	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	Rp	-
1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2017 sebesar Rp0,00 dikapitalisasi pada aset-aset sebagai berikut:

	JUMLAH	Rp	
5	Tidak dikapitalisasi	Rp	-
4	Kapitalisasi pada Lisensi	Rp	
3	Kapitalisasi pada Software	Rp	1
2	Kapitalisasi pada Aktiva Tetap dalam Renovasi	Rp	-
1	Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	Rp	-

(Rincian Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 33)

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Perbandingan Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Komposisi Perbandingan Neraca Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%
Aset		-	0,00
Kewajiban	-	-	0,00
Ekuitas	-	-	0,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0,00, Aset Tetap sebesar Rp0,00, serta Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

(Neraca dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 6)

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. ASET LANCAR

Rp0,00 juta

Aset Lancar Tidak terdapat saldo Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016.

Tabel 18 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	
3	Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	-	
4	Piutang Bukan Pajak	-	
5	Penyisihan Rutang Tidak Tertagih -	-	
6	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	
7	Penyisihan Flutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	
8	Persediaan	-	
	Total	-	

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran Rp0,00 juta

Kas di Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Uang di rekening Bank BNI No.acc 852806666	-	-
Uang Tunai	12:	
Jumlah	-	

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2016 senilai Rp0,00 dan telah disetorkan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Penyetoran pada 2017 untuk Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016

(dalam Rupiah)

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
				-
		lumlah		

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 senilai Rp0,00 dengan rincian peyetoran nihil uang persediaan sebagai berikut:

Penyetoran Saldo nihil uang persediaan per 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
1	27/12/2017	36FE64F9IU69IHLP	BNI	83.845.066
		Jumlah		83.845.066

Penyetoran Saldo uang persediaan setelah tanggal 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
				-
		Jumlah		-

C.2.2. ASET TETAP

Aset Tetap Tidak terdapat nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan Rp0, 00 juta 2016.

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Tanah	-	
2	Peralatan dan Mesin	-	
3	Gedung dan Bangunan	-	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		10
5	Aset Tetap Lainnya	-	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		9.
	Jumlah	-	10
7	Akumulasi Penyusutan		
	Nilai Buku Aset Tetap		

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2017 pada Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 19 Rincian Perbandingan Aset Tetap pada Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN Per 31 Desember 2017

(dalamRupiah) No. Uraian SAIBA SMAK-BMN Selisih 2 Peralatan dan Mesin 3 Gedungdan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset Tetap Lainnya 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap

C.2.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

PanjangRp0,00 juta

Piutang Jangka Tidak terdapat saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam Rupiah)

No	Uraian Akun	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Tagihan TP/TGR	-	4 -
2	Penyisihan Flutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	-	-
	Jumlah	-	

C.2.4. ASET LAINNYA

Rp0,00 juta

Aset Lainnya Tidak terdapat nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Aset Tak Berwujud	-	
2	Aset Lain-Lain	-	
	Jumlah	-	
Akumi Lainny	ulasi Penyusutan/Amortisasi Aset va	-	1
	Nilai Buku Aset Lainnya	-	

C.2.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Jangka Pendek 2016. Rp0,00

Kewajiban Tidak terdapat saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan

(dalam Rupiah)

juta

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	
2	Pendapatan Diterima dimuka	-	
3	Uang Muka dari KPPN	-	
4	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	
	Jumlah		

C.2.6. EKUITAS

Ekuitas Rp0,00 Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar juta Rp0,00 dan Rp0,00.

> Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Komposisi Perbandingan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Komposisi Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	2017	2016	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(7.395.742.727)	(7.225.663.687)	2,35
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	703.994	(3.034.152)	(123,20)
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa		-	
Surplus/Defisit LO	(7.395.038.733)	(7.228.697.839)	2,30

Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp7.395.742.727,00 terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dan Beban Operasional sebesar Rp7.395.742.727,00.

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp703.994,00 terdiri dari Surplus Pelepasan Aset Non lancar sebesar Rp0,00, Surplus Penyelesaiaan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00, serta Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp703.994,00.

Surplus Dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

(Laporan Operasional dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 8)

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

D.2.1. PENDAPATAN OPERASIONAL

Rp0,00 juta

Pendapatan Tidak terdapat saldo Pendapatan Operasional Untuk periode yang berakhir Operasional pada 31 Desember 2017 dan 2016.

D.2.2. BEBAN OPERASIONAL

Beban Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember Operasional 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7.395.742.727,00 dan Rp7.395,74 juta Rp7.225.663.687,00.

> Beban Operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari:

Tabel 21 Rincian Perbandingan Beban Opersional Tahun 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2017	2016	%
1	Beban Pegawai			-
2	Beban Persediaan		-	
3	Beban Barang dan Jasa	-	*	
4	Beban Pemeliharaan	-		
5	Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi		-	-
7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-
8	Beban Lain-lain		-	-
	Jumlah Beban Operasional			-

D.2.2.1. Beban Persediaan

Rp73,64 juta

Beban Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember Persediaan 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp73.642.229,00 dan Rp110.040.880,00, terjadi penurunan sebesar Rp36.398.651,00 atau 33,08%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

> Rincian Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Beban Persediaan Tahun 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	2017	2016	%
1	Beban Persediaan Konsumsi	73.642.229	110.040.880	(33,08)
2	Beban Persediaan Bahan Baku			-
3	Beban Persediaan Lainnya			-
	Jumlah	73.642.229	110.040.880	(33,08)

D.2.2.2. Beban Barang dan Jasa

Rp1.287,62 juta

Beban Barang Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 dan Jasa Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.287.624.145,00 dan Rp1.152.908.303,00, terjadi kenaikan sebesar Rp134.715.842,00 atau 11,68%. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

> Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	2017	2016	%
Beb	oan Barang			
1	Beban Barang Operasional	1.192.495.454	1.090.976.626	9,31
2	Beban Barang Non Operasional	95.128.691	61.931.677	53,60
3	Beban Kontribusi		*	
Beb	oan Jasa			
1	Beban Langganan Daya dan Jasa			
2	Beban Jasa Pos dan Giro			-
3	Beban Jasa Konsultan			
4	Beban Jasa Profesi		-	
5	Beban Jasa Lainnya			
Beb	oan Barang Lainnya			
1	Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan Mesin		-	
2	Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	#	-
3	Beban Aset Extrakomtabel Aset Tetap Lainnya			
	Jumlah	1.287.624.145	1.152.908.303	11,68

D.2.2.4. Beban Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Rp6.034,48 juta

Beban Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.034.476.353,00 dan Rp5.962.714.504,00, terjadi kenaikan sebesar Rp71.761.849,00 atau 1,20%. Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

> Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	2017	2016	%
1	Beban Perjalanan Biasa	5.688.401.353,00	5.455.691.904,00	4,27
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.325.000,00	34.975.000,00	(19,01)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	317.750.000,00	472.047.600,00	(32,69)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	986		
	Jumlah	6.034.476.353,00	5.962.714.504,00	1,20

D.2.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Operasional Rp0,70 juta

Kegiatan Non Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp703.994,00 dan (Rp3.034.152,00).

> Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

> Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Opersaional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat untuk periode

yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 25 Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Opersaional Tahun 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	2017	2016	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	*		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Surplus/(Defisit) Penyelesaiaan Kewajiban Jangka Panjang			
Pendapatan Penyelesaiaan Kewajiban Jangka Panjang			
Beban Penyelesaiaan Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainya	709.454	329.288	115,45
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainya	5.460	3.363.440	(99,84)
Surplus' (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	703.994	(3.034.152)	(123,20)

D.2.3.1. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0,70 juta

Surplus Dari Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp703.994,00 dan (Rp3.034.152,00), terjadi kenaikan sebesar Rp3.738.146,00 atau (123,20%). Surplus atau Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan kegiatan menerima pendapatan yang bukan pendapatan operasional dikurangi beban yang bukan beban

> Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016	%
1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
	a Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara		-	-
	b Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		- - - - 4 329.288 4 329.288	-
	c Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		-	-
	d Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu		-	-
	e Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		-	-
	f Pendapatan Perolehan Aset Lainnya			-
	g Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	709.454	329.288	1,15
	Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	709.454	329.288	1,15
2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
	a Beban Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-	-	0,00
	b Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	5.460	3.363.440	-1,00
	Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.460	3.363.440	-1,00
	Surplus' (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	703.994	(3.034.152)	-1,23

D.2.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa Tidak terdapat nilai Pos Luar Biasa Untuk periode yang berakhir pada 31 Rp0,00 juta Desember 2017 dan 2016.

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering

terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%
Ekuitas Awal			
Surplus/Defisit LO	(7.395.038.733)	(7.228.697.839)	2,30
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas			
Transaksi Antara Entitas	7.395.038.733	7.228.697.839	2,30
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		-	
Ekuitas Akhir			

Jumlah Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2017 sebesar Rp0,00.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp7.395.038.733,00.

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

Jumlah Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.395.038.733,00.

Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

(Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 9)

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.2.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-Rp0,00 juta masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

> Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

E.2.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berkahir pada 31 Desember 2017 Rp7.395,04 juta dan 2016 masing-masing sebesar Rp7.395.038.733,00 dan Rp7.228.697.839,00.

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.2.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN **MENDASAR**

Koreksi Yana Menambah/Me ngurangi Ekuitas Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Berasal Dari Dampak Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016.

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan Penyesuaian nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi serta Koreksi Lain-lain yang dilakukan pada periode berjalan terhadap nilai ekuitas dari akun-akun Aset pada tahun lalu.

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 28

Rincian Perbandingan Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(dalamRupiah)

No	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%
1	Penyesuaian Nilai Aset		-	
2	Koreksi Nilai Persediaan	-	4	
3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-		
4	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		-	
5	Lain-lain		-	
- 10	Jumlah			

E.2.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan Entitas 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp7.395.038.733,00 Rp7.395,04 juta dan Rp7.228.697.839,00.

Transaksi Antar Entitas merupakan kegiatan entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Perbandingan Nilai Transaksi antar Entitas

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	dalam rupia					
No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%		
1	Diterima Dari Etitas Lain	-	-	-		
2	Ditagihkan ke Entitas Lain	7.395.038.733,00	7.228.697.839,00	2,30		
3	Transfer Masuk	-		-		
4	Transfer Keluar	-	-	-		
5	Pengesahan Hibah Langsung	-	-	-		
6	Pengesahan Pengembalian Hibah	-		-		
	Jumlah	7.395.038.733,00	7.228.697.839,00	2,30		

E.2.4.1. Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp7.395.038.733,00 dan Rp7.228.697.839,00.

E.2.5. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Rp0,00 juta Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

- F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
- F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang dimiliki Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat (kode satker 890615) yang masih dipertahankan adalah Rekening Giro pada PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0369530256 atas nama Bpg 038 BPK Perwakilan Provinsi NTB (status aktif). KPPN Pemberi Persetujuan adalah KPPN Mataram

(Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 27)

F.4. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN OLEH KAP

(Rincian temuan dan Progres Tindak Lanjut atas temuan pemeriksaan KAP dilampirkan pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 28)

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode vang Berakhir pada 31 Desember 2017

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny. Per 31-12-2017	Total Akm. Peny. Per 31-12-2017	Nilai Buku Per 31-12-2017
NO	Aset Tetap	ap Wasa Wallaat		Per 31-12-2016	Per 31-12-2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Α	Tanah							
1	Tanah							
	Jumlah							
В	Peralatan dan Mesin							
1	Alat Angkutan Darat Bermotor							
2	Alat Kantor							
3	Alat Rumah Tangga							
4	Alat Komunikasi							
5	Komputer Unit							
6	Peralatan Komputer							
7	Peralatan Olah Raga							
	Jumlah							
С	Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja							
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal							
	Jumlah		The second		THE PROPERTY.	Carlotte Carlotte Carlotte		
D	Jaringan							
1	Jaringan Listrik							
2	Jaringan Telepon							
	Jumlah			STEP ROLL S	STEP SECTION			
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan							
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan							
	Jumlah							
F	Aset Tetap Lainnya							
1	Barang bercorak kesenian							
2								
W.	Jumlah							

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Total Akm. Peny.	Nilai Buku
	Ascrictap	Wasa Wainaat	Milai rerolenan	Per 31-12-2016	Per 31-12-2017	Per 31-12-2017	Per 31-12-2017	Per 31-12-2017
G	Aset Lainnya							
1	Aset Tak Berwujud*							
2	Aset yang dihentikan penggunaannya							
	Jumlah			200		my		Mark to Company
	Total			A LESS DE LES SENSON			Part of the last o	COLUMN TO THE REAL PROPERTY.

^{*} Beban Amortisasi

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat Rincian Nilai Koreksi-Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2017

No	Aset Tetap/Uraian Koreksi	Akumulasi Penyusutan
Α	Peralatan dan Mesin	Per 31-12-2017
Α_	Koreksi Saldo Awal	
	Koreksi Nilai Pembelian	
		-
	Transfer Masuk Reklasifikasi Masuk	-
		-
_	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
	Penghapusan	-
	Transfer Keluar	-
	Reklasifikasi Keluar	-
	Penghentiaan Aset Dari	-
	Penggunaan	-
	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
_	Jumlah	-
В	Gedung dan Bangunan	
	Koreksi Pembelian	-
	Reklasifikasi Masuk	-
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
	Transfer Keluar	-
	Reklasifikasi Keluar	-
	Jumlah	
С	Jalan dan Jembatan	
	Reklasifikasi Masuk	-
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
	Jumlah	-
D	Irigasi	
	Reklasifikasi Masuk	-
	Transfer Keluar	-
	Jumlah	
E	Jaringan	
	Pembelian	-
	Transfer Keluar	-
	Koreksi Pencatatan	-
	Jumlah	
F	Aset Tetap Lainnya	
	Reklasifikasi Masuk	-
	Transfer Keluar	-
	Jumlah	_

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat Rincian Nilai Koreksi-Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2017

No	Aset Tetap/Uraian Koreksi	Akumulasi Penyusutan
		Per 31-12-2017
G	Software	
	Reklasifikasi Masuk	-
	Transfer Keluar	-
	Jumlah	-
Н	Lisensi	
	Reklasifikasi Masuk	-
	Transfer Keluar	-
	Jumlah	-
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam OperasiPemerintahan	
	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-
	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-
	Jumlah	-
	Total*	-

^{*)} Nilai Total harus sama dengan Nilai Total pada Kolom 7 lampiran A.1

DAFTAR LAMPIRAN

Α.	Lampiran-Lam	npiran Pendukung Sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor								
	PER-42/PB/20	016								
	Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran:								
		 a. Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir 31 Desember 2017 b. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 								
	Lampiran 2	Laporan Realisasi Belanja Satuan Kerja melalui KPPN Tahun 2017								
	Lampiran 3	Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satuan Kerja melalui KPPN								
	Tahun 2017									
	Lampiran 4 Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja me KPPN Tahun 2017 Lampiran 5 Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Sat									
		Kerja melalui KPPN Tahun 2017								
	Lampiran 6	Neraca Tingkat Satuan Kerja:								
		a. Neraca per 31 Desember 2017								
		b. Neraca per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016								
	Lampiran 7	Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja per 31 Desember 2017 (Basis								
		Kas dan Akrual)								
	Lampiran 8	Laporan Operasional Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31								
		Desember 2017 dan 2016								
	Lampiran 9	Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016								
В.	Laporan Barar	ng Kuasa Pengguna Tahunan								
	Lampiran 10	Catatan Ringkas Barang Milik Negara Satker Tahun Anggaran 2017								
	Lampiran 11	Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2017								
	Lampiran 12	Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan – Intrakomptabel Rincian								
		Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2017								
	Lampiran 13	Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan – Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2017								
	Lampiran 14	Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Gabungan								
	compilar 14	Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub - sub Kelompok								
		Barang Tahun Anggaran 2017								
	Lampiran 15									
	Lampiran 15	Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Barang Bersejarah Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2017								
	Lampiran 16	Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Aset Tak Berwujud								
	######################################	Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2017								
	Lampiran 17	Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Konstruksi Dalam Pengerjaan Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2017								
	Lampiran 18	Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan –								

	Anggaran 2017
Lampiran 19	Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan –
	Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun
	Anggaran 2017
Lampiran 20	Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan – Gabungan
	Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-sub Kelompok
	Barang Tahun Anggaran 2017
Lampiran 21	Laporan Amortisasi Barang Kuasa Pengguna Tahunan – Aset Tak
	Berwujud Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran
	2017
Lampiran 22	Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Proses Penghapusan
	Kepada Pengelola Barang Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang
	Tahun Anggaran 2017
Lampiran 23	Laporan Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang Telah Diusulkan
	Proses Penghapusan Kepada Pengelola Barang Tahun Anggaran 2017
Lampiran 24	Laporan Kondisi Barang per 31 Desember 2017 (hasil cetakan khusus
	BMN yang dalam kondisi rusak)
Lampiran 25	Berita Acara Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2017
Lampiran 26	Laporan Barang Persediaan per 31 Desember 2017:
	a. Laporan Barang Persediaan dari aplikasi Persediaan
	b. Laporan Barang Persediaan dari aplikasi SIMAK BMN

C. Lampiran-Lampiran Lainnya Sebagai Pendukung Catatan atas Laporan Keuangan

Lampiran 27 Laporan Rekening Pemerintah

Lampiran 28 Lampiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan KAP

Lampiran 29 Berita Acara Rekonsiliasi:

- a. Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 (tanpa lampiran).
- b. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) per 31 Desember 2017.
- c. Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data BMN antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) per 31 Desember 2017 (tanpa lampiran).
- Lampiran 30 Daftar SSBP untuk Penyetoran Sisa Uang Persediaan (UP) Tahun 2016 yang disetor Tahun 2017 beserta fotokopi dokumen SSBP dan Daftar Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2016 dan 2017.
- Lampiran 31 Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017

Lampiran 32 Daftar Aset yang Berasal dari Belanja Barang Tahun 2017
 Lampiran 33 Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi Tahun 2017
 Lampiran 34 Lampiran Pendukung CaLK yaitu:

- a. Kertas Kerja Perhitungan Belanja Barang Dibayar di Muka (*Prepaid*)
- b. Daftar Rekapitulasi Piutang Bukan Pajak
- c. Kartu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- d. Daftar Penyetoran Piutang Lainnya per 31 Desember 2017
- e. Kertas Kerja Analisa Belanja Modal
- f. Kertas Kerja Persediaan
- g. Status Tanah
- h. Lampiran Utang Kepada Pihak Ketiga yaitu:
 - Daftar Pembayaran atas saldo Belanja Pegawai/Barang yang Masih Harus di bayar 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2017 (Beserta No. SPM/SP2D)
 - Rekapitulasi Perhitungan Kekurangan Pembayaran Gaji, Uang Makan Pegawai per 31 Desember 2017
 - Rekapitulasi Kekurangan Pembayaran Tagihan Langganan Daya dan Jasa per 31 Desember 2017
- i. Kertas Kerja Perhitungan Pendapatan Sewa Diterima Di Muka



LAMPIRAN 1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

ESELON I

: 02

B. P. K. PUSAT

WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA

2300

NUSA TENGGARA BARAT

JENIS KEWENANGAN

890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

: KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISAS ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	
А	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
	PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	0	0	0.00	
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	
- 1	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	ATAS (BAWAH) ANGGARAN 5 0 0 0 0 0 0 (552,919,267) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00	
В	2. HIBAH	0	0	0	0.00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	0.00	
В	BELANJA					
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	
	Belanja Barang	7,947,958,000	7,395,038,733	(552,919,267)	93.04	
	Belanja Modal	0	0	0	0.00	
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	
	Subsidi	0	0	0	0.00	
	Hibah	0	0	0	0.00	
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	
	Belanja Lain-lain	0	0	0.00		
	JUMLAH BELANJA	7,947,958,000	7,395,038,733	(552,919,267)	93.04	
С	PEMBIAYAAN					
	1 PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	
- 1	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	
1	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00	

Mataram, 20 April 2018 Kepala Perwakilan

Wahyu Priyono

NIP. 197006011991031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

ESELON I

: 02

B. P. K. PUSAT

WILAYAH/PROPINSI

2300

NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA

: 8

890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS KEWENANGAN

: KD

KANTOR DAERAH

			201	7				5	
No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Α	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0.00	0	0	0	0,00
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
В	BELANJA NEGARA								
B.I.1	Rupiah Murni	7,947,958,000	7,395,038,733	(552,919,267)	93.04	8,553,347,000	7,228,697,839	(1,324,649,161)	84.51
B.I.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.b	Belanja Barang	7,947,958,000	7,395,038,733	(552,919,267)	93.04	8,553,347,000	7,228,697,839	(1,324,649,161)	84.51
B.I.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	o	0	0.00
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	o	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	7,947,958,000	7,395,038,733	(552,919,267)	93.04	8,553,347,000	7,228,697,839	(1,324,649,161)	84.51
С	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

ESELON I

: 02

B. P. K. PUSAT

WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA

: 2300

NUSA TENGGARA BARAT 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS KEWENANGAN

: KD

KANTOR DAERAH

2016

		2017 2016					6		
No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Mataram, 20 April 2018 Kepala Perwakilan



LAMPIRAN 2

LAPORAN REALISASI BELANJA SATKER PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN **TAHUN 2017** (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

ESELON I WILAYAH/PROPINSI : 02

B. P. K. PUSAT

: 2300

NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA JENIS SATUAN KERJA

: KD

: 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01

Tanggal

: 12 Februari 2018

Halaman

1

Prog.ld

: lu lrabstkt

	NATWOOD .		ANGGARAN SETELAH		REALISASI	BELANJA		% REALISASI	2120 102221244
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	REVISI	TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSAKSI KAS								
01	RUPIAH MURNI								
0	RM								
01	PELAYANAN UMUM								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI								
80	Program Pemeriksaan Keuangan Negara								
1043	Perneriksaan Keuangan Negara dan Pernantauan Penyelesalan Kerugian Negara								
085	Rumusan Bahan Pendapat								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	2,900,000	0	0	0	0	0	0.00	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,900,000	0	0	0	0	0	0.00	
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,925,000	4,925,000	4,918,600	4,918,600	0	4,918,600	99.87	6,40
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	4,925,000	4,925,000	4,918,600	4,918,600	0	4,918,600	99.87	6,40
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	7,825,000	4,925,000	4,918,600	4,918,600	0	4,918,600	99.87	6,40
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1043:085	7,825,000	4,925,000	4,918,600	4,918,600	0	4,918,600	99.87	6,40
086	Layanan Administrasi Pemeriksaan								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	60,696,000	57,366,000	51,028,691	51,028,691	0	51,028,691	88.95	6,337,30
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	50,000,000	45,000,000	44,100,000	44,100,000	0	44,100,000	98.00	900,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	110,696,000	102,366,000	95,128,691	95,128,691	0	95,128,691	92.93	7,237,30

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN **TAHUN 2017** (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

ESELON I

JENIS SATUAN KERJA

: 02 B. P. K. PUSAT

WILAYAH/PROPINSI

: 2300 **NUSA TENGGARA BARAT**

KANTOR DAERAH

SATUAN KERJA

890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

: KD

Kode Lap. : LRBST 01

Tanggal

: 12 Februari 2018

Halaman

2 Prog.ld : lu lrabstkt

10/decimose-	TO ANNUAL TO A STATE OF THE STA	atu ka katangan pada managan ka managan managan managan managan managan managan managan managan managan managa Managan managan managa	ANGGARAN SETELAH		REALISASI	BELANJA		% REALISASI	
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	REVISI	TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5218	Belanja Barang Persediaan						Net control		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32,586,000	60,771,000	46,126,435	46,126,435	0	46,126,435	75.90	14,644,565
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	32,586,000	60,771,000	46,126,435	46,126,435	0	46,126,435	75.90	14,644,565
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	439,980,000 28,800,000	1,131,870,000 28,800,000	1,081,335,102 28,325,000	1,081,335,102 28,325,000	(8,102,890)	1,073,232,212	94.82 98.35	58,637,788 475,000
257.0 (107.0	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	468,780,000	1,160,670,000	1,109,660,102	1,109,660,102	(8,102,890)	1.101.557.212	95.61	59,112,788
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	612,062,000	1,323,807,000	1,250,915,228	1,250,915,228	(8,102,890)	1,242,812,338	94.49	80,994,662
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1043.086	612,062,000	1,323,807,000	1,250,915,228	1,250,915,228	(8,102,890)	1,242,812,338	94.49	80,994,662
088 52 5212 521211	Sumbangan IHPS BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	10,760,000	0	o	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	10,760,000	0	0	0	0	0	0.00	0
5218 521811	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9,336,000	9,336,000	9,257,700	9,257,700	0	9,257,700	99.16	78,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	9,336,000	9,336,000	9,257,700	9,257,700	0	9,257,700	99.16	78,300
5241 524114	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	132,920,000	66,460,000	42,425,000	42,425,000	0	42,425,000	63.84	24,035,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	132,920,000	66,460,000	42,425,000	42,425,000	0	42,425,000	63.84	24,035,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	153,016,000	75,796,000	51,682,700	51,682,700	0	51,682,700	68.19	24,113,300
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1043.088	153,016,000	75,796,000	51,682,700	51,682,700	0	51,682,700	68.19	24,113,300
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1043	772,903,000	1,404,528,000	1,307,516,528	1,307,516,528	(8,102,890)	1,299,413,638	93.09	105,114,362
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN **TAHUN 2017**

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT

WILAYAH/PROPINSI : 2300 **NUSA TENGGARA BARAT** SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode	Lap.	: L	RBST	0
Noue	Lap.		1001	•

Tanggal : 12 Februari 2018

Halaman 3 Prog.ld : lu_lrabstkt

		7772272277	ANGGARAN SETELAH		REALISASI	BELANJA		% REALISASI	
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	REVISI	TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	Penyelesaian Kerugian Negara LHP BPK Perwakilan Prov. NTB								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
21119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,138,811,000	1,016,811,000	964,685,691	964,685,691	0	964,685,691	94.87	52,125,3
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,138,811,000	1,016,811,000	964,685,691	964,685,691	0	964,685,691	94.87	52,125,3
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
24111	Belanja Perjalanan Biasa	4,624,924,000	4,473,478,000	4,467,197,977	4,467,197,977	(201,911,367)	4.265,286,610	95.35	208,191,3
24114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	662,875,000	309,800,000	275,325,000	275,325,000	0	275,325,000	68.87	34,475,0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	5,287,799,000	4,783,278,000	4,742,522,977	4,742,522,977	(201,911,367)	4,540,611,610	99.15	242,666,3
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,426.610,000	5,800,089,000	5,707.208,668	5,707,208,668	(201,911,367)	5,505,297,301	98.40	294,791,6
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1043.118	6,426,610,000	5,800,089,000	5,707,208,668	5,707,208,668	(201,911,367)	5,505,297,301	98.40	294,791,6
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1043	6,426,610,000	5,800,089,000	5,707,208,668	5,707,208,668	(201,911,367)	5,505,297,301	98.40	294,791,6
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Keruglan Negara								
158	Laporan pemantauan BPK Perwakilan Prov. NTB								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional		Lightly Street Cortes?						
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	300,938,000	300,938,000	227,809,763	227,809,763	0	227,809,763	75.70	73,128,2
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	300,938,000	300,938,000	227,809,763	227,809,763	0	227,809,763	75.70	73,128,2
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
24111	Belanja Perjalanan Biasa	429,700,000	429,700,000	358,268,131	358,268,131	(8,385,600)	349,882,531	81.42	79,817,4
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	429,700,000	429,700,000	358,268,131	358,268,131	(8,385,600)	349,882,531	83.38	79,817,4
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	730,638,000	730,638,000	586,077,894	586,077,894	(8,385,600)	577,692,294	80.21	152,945,7

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN TAHUN 2017 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

ESELON I

: 02 B. P. K. PUSAT

WILAYAH/PROPINSI

2300 NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA

890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS SATUAN KERJA

: KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01

Tanggal : 1

: 12 Februari 2018

Halaman

: 4

Prog.ld : lu_lrabstkt

			ANGGARAN SETELAH		REALISASI	BELANJA		% REALISASI	
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	REVISI	TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1043.158	730,638,000	730,638,000	586,077,894	586,077,894	(8,385,600)	577,692,294	80.21	152,945,70
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1043	730,638,000	730,638,000	586,077,894	586,077,894	(8,385,600)	577,692,294	80.21	152,945,70
1043 174 52	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Laporan Profil Entitas BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional	5 404 000	0		0	0	0	0.00	
521211	Belanja Bahan	5,104,000	-72	0	177.0			4000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5,104,000	0	0	0	0	0	0.00	
5218 521811	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12,703,000	12,703,000	12,635,500	12,635,500	0	12,635,500	99.47	67,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	12,703,000	12,703,000	12,635,500	12,635,500	0	12,635,500	99.47	67,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	17,807,000	12,703,000	12,635,500	12,635,500	0	12,635,500	99.47	67,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1043.174	17,807,000	12,703,000	12,635,500	12,635,500	0	12,635,500	99.47	67,500
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1043	17,807,000	12,703,000	12,635,500	12,635,500	0	12,635,500	99.47	67,500
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.08	7,947,958,000	7,947,958,000	7,613,438,590	7,613,438,590	(218,399,857)	7,395,038,733	95.79	552,919,267
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01.01	7,947,958,000	7,947,958,000	7,613,438,590	7,613,438,590	(218,399,857)	7,395,038,733	95.79	552,919,267
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	7,947,958,000	7,947,958,000	7,613,438,590	7,613.438,590	(218,399,857)	7,395,038,733	95.79	552,919,267
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	7,947,958,000	7,947,958,000	7,613,438,590	7,613,438,590	(218,399,857)	7,395,038,733	95.79	552,919,267
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	7,947,958,000	7,947,958,000	7,613,438,590	7,613,438,590	(218,399,857)	7,395,038,733	95.79	552,919,267
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	7,947,958,000	7,947,958,000	7,613,438,590	7,613,438,590	(218,399,857)	7,395,038,733	95.79	552,919,267
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	7,947,958,000	7,947,958,000	7,613,438,590	7,613,438,590	(218,399,857)	7,395,038,733	95.79	552,919,267
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	7,947,958,000	7,947.958,000	7,613,438,590	7,613.438.590	(218,399,857)	7,395,038,733	95.79	552,919,267

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN **TAHUN 2017** (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

ESELON I

: 02

B. P. K. PUSAT

: 2300

NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA

: 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS SATUAN KERJA

WILAYAH/PROPINSI

: KD KANTOR DAERAH Kode Lap.

: LRBST 01

Tanggal

: 12 Februari 2018

Halaman

5

Prog.ld

: lu_lrabstkt

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	THE THE PROPERTY OF THE PROPER	ANGGARAN SETELAH		REALISASI	BELANJA		% REALISASI	SISA ANGGARAN
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	REVISI	TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	7,947,958,000	7.947,958,000	7,613,438,590	7,613,438,590	(218,399,857)	7,395,038,733	95.79	552,919,267
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	7,947,958,000	7,947,958,000	7,613,438,590	7,613,438,590	(218,399,857)	7,395,038,733	95.79	552,919,267
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	7,947,958,000	7,947,958,000	7,613,438,590	7,613,438,590	(218,399,857)	7,395,038,733	95.79	552,919,267
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	7,947,958,000	7,947,958,000	7,613,438,590	7,613,438,590	(218,399,857)	7,395,038,733	95.79	552,919,267



LAMPIRAN 3 LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA SATKER PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2017

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN **TAHUN 2017** (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

ESELON I

: 02

B. P. K. PUSAT

WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA

: 2300

NUSA TENGGARA BARAT

: 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01

: 12-02-18 Tanggal

Halaman : 1

: lu_lrapbstkth Prog.ld

		Manager and the second second	ANGGARAN SETELAH	REALIS	ASI PENGEMBALIAN BEL	ANJA	% REALISASI	DIES AMOOFERING
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	REVISI	JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI	ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSAKSI KAS							
01	RUPIAH MURNI							
0	RM							
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara							
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara							
086	Layanan Administrasi Pemeriksaan							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
24111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	0	8,102,890	8,102,890	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	8,102,890	8,102,890	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	8,102,890	8,102,890	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 1043.086	0	0	0	8,102,890	8,102,890	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 1043	0	0	0	8,102,890	8,102,890	0.00	
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara							
118	LHP BPK Perwakilan Prov. NTB							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
24111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	120,760,435	81,150,932	201,911,367	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	120,760,435	81,150,932	201,911,367	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	120,760,435	81,150,932	201,911,367	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 1043.118	0	0	120,760.435	81,150,932	201,911,367	0.00	

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN **TAHUN 2017** (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

ESELON I

: 02

B. P. K. PUSAT

WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA

: 2300 : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

NUSA TENGGARA BARAT

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01

Tanggal : 12-02-18

Halaman : 2

Prog.ld : lu Irapbstkth

	WARDOW W	2022232222222	ANGGARAN SETELAH	REALIS	ASI PENGEMBALIAN BEL	ANJA	% REALISASI	SISA ANGGARAN
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	REVISI	JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI	ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 1043	0	0	120,760,435	81,150,932	201,911,367	0.00	
1043 158 52 5241	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Laporan pemantauan BPK Perwakilan Prov. NTB PENGEMBALIAN BELANJA BARANG Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	0	8,385,600	8,385,600	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	8,385,600	8,385,600	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	8,385,600	8,385,600	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 1043.158	0	0	0	8,385,600	8,385,600	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 1043	0	0	0	8,385,600	8,385,600	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.01.08	0	0	120,760,435	97,639,422	218,399,857	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01.01	0	0	120,760,435	97,639,422	218,399,857	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01	0	0	120,760,435	97,639,422	218,399,857	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0	0	0	120,760,435	97,639,422	218,399,857	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01	0	0	120,760,435	97,639,422	218,399,857	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD	0	0	120,760,435	97,639,422	218,399,857	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS	0	0	120,760,435	97,639,422	218,399,857	0.00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	0	0	120,760,435	97,639,422	218,399,857	0.00	



LAMPIRAN 4

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATKER PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN

UNTUK TAHUN 2017 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

ESELON I WILAYAH/PROPINSI : 2300

B. P. K. PUSAT

NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA

: 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS SATKER

: XX

Cek Tabel

KD. LAPORAN : LRPS.T01

TANGGAL : 12/02/18

HAL : 1

PROG. ID: : lue_penblank

				REALISASI	PENDAPATAN		%
KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	REAL PEND
1	2	3	4	5	6		7
			***************************************	Tidak Ada Data Ya	ng Dicetak	_	



LAMPIRAN 5 LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATKER PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2017

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN **UNTUK TAHUN 2017**

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

ESELON I WILAYAH/PROPINSI : 02

B. P. K. PUSAT : 2300

SATUAN KERJA JENIS SATKER

: 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB : XX

NUSA TENGGARA BARAT

Cek Tabel

KD. LAPORAN : LPPE.T01b

: 1

: 12/02/18

TANGGAL HAL

PROG. ID: : lue penblank

			REALISAS	I PENGEMBALIAN P	PENDAPATAN	%
KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	REAL PEND
1	2	3	4	5	6	7
		Tidak Ada Data	Yang Dicetak			
		Hoak Ada Data	rang Dicetak			



LAMPIRAN 6 NERACA

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2017 (DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: LSAIKB Tanggal : 22/05/18 Halaman : 1 Halaman

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

UNIT ORGANISASI

: 02

B. P. K. PUSAT

WILAYAH/PROPINSI

: 2300

NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA

: 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS KEWENANGAN

: KD

KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	0
JUMLAH EKUITAS	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0

Mataram, 20 April 2018 Kepala Perwakilan



LAMPIRAN 7 NERACA PERCOBAAN PER 31 DESEMBER 2017

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2017 (DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAIKT Tanggal : 12-02-18 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

ESELON I

: 02

B. P. K. PUSAT

: 2300

NUSA TENGGARA BARAT

WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115612	Piutang dari KPPN	552,919,267	
2	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya		1,317,749,000
2	521211	Allotment Belanja Bahan		57,366,000
2	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan		45,000,000
2	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		87,735,000
2	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa		6,035,048,000
2	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		28,800,000
2	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		376,260,000
3	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,192,495,454	
3	521211	Belanja Bahan	51,028,691	
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	44,100,000	
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	72,938,235	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	5,906,801,210	
3	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa		218,399,857
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,325,000	
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	317,750,000	
		JUMLAH	8,166,357,857	8,166,357,857

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2017 (DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAIKT Tanggal : 12-02-18 Halaman : 1 **NPSAIKT**

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

ESELON I

: 004 : 02

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA

: 2300

NUSA TENGGARA BARAT

B. P. K. PUSAT

: 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

DE	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
	2	3	4	5
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		7,395,038,733
	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		709,45
	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,192,495,454	
	521211	Beban Bahan	51,028,691	
	521213	Beban Honor Output Kegiatan	44,100,000	
	524111	Beban Perjalanan Biasa	5,906,801,210	
	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa		218,399,857
	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,325,000	
	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	317,750,000	
	593111	Beban Persediaan konsumsi	73,642,229	
	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	5,460	
		JUMLAH	7,614,148,044	7,614,148,044



LAMPIRAN 8 LAPORAN OPERASIONAL PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2017

Tanggal : 22/05/18 Kode Laporan : lu_losatker

Halaman

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2017 DAN 2016 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI : 02 : 2300 B. P. K. PUSAT **NUSA TENGGARA BARAT**

SATUAN KERJA

: 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS KEWENANGAN

: KD

KANTOR DAERAH

URAIAN	JUML	AH	Kenaikan (Penuru	ınan)
ORAIAN	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.0
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0.0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0.0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	0	0	0.0
Beban Persediaan	73,642,229	110,040,880	(36,398,651)	(33.0
Beban Barang dan Jasa	1,287,624,145	1,152,908,303	134,715,842	11.6
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0.0
Beban Perjalanan Dinas	6,034,476,353	5,962,714,504	71,761,849	1.2
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.0
Beban Bunga	0	0	0	0.0
Beban Subsidi	0	0	0	0.0
Beban Hibah	0	0	0	0.0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0.0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.0
Beban Transfer	0	0	0	0.0
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.0

Tanggal : 22/05/18 Kode Laporan : lu_losatker Halaman : 2

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2017 DAN 2016 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI : 02

B. P. K. PUSAT

: 2300

NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA

: 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS KEWENANGAN

: KD

KANTOR DAERAH

URANA		JU	MLAH			Kenaikan (Penu	run	an)
URAIAN		2017		2016	Jumlah		%	
1		2		3		4		5
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		7,395,742,727		7,225,663,687		170,079,040	(20.18
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,395,742,727)	(7,225,663,687)	(170,079,040)		20.18
KEGIATAN NON OPERASIONAL								
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR								
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0		0		0		0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0		0		0		0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0		0		0		0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG								
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0		0		0		0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0		0		0		0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0		0		0		0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA								
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		709,454		329,288		380,166	(115.45
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5,460		3,363,440	(3,357,980)	(99.83
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		703,994	(3,034,152)		3,738,146	(123.20)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		703,994	(3,034,152)		3,738,146	(15.61)
POS LUAR BIASA								
Beban Luar Biasa		0		0		0		0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0		0		0		0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(7,395,038,733)	(7,228,697,839)	(166,340,894)		4.57

Mataram, 20 April 2018 Kepala Perwakilan



LAMPIRAN 9 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2017

Tanggal Kode Laporan: Halaman

22/05/18 lu_lpesatker 1

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

UNIT ORGANISASI

: 02

B. P. K. PUSAT

WILAYAH/PROPINSI

: 2300

NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA

: 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS KEWENANGAN

: KD

KANTOR DAERAH

URAIAN		JUMLAH			Kenaikan (Penurunan)		
ORAIAN		DESEMBER 2017	31 [DESEMBER 2016		Jumlah	%
1		2		3		4	5
EKUITAS AWAL		0		0		0	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,395,038,733)	(7,228,697,839)	(166,340,894)	2.30
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI		0		0		o	0.00
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI							
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN				1			
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR				- 1			
Penyesualan Nilai Aset		0		0		0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan		0		0		0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0		0		0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		0		0		0	0.00
Koreksi Lain-lain		0		0		0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		7,395,038,733		7,228,697,839		166,340,894	2.30
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		0		0		0	0.00
EKUITAS AKHIR		0		0		0	0.00

Mataram, 20 April 2018 Kepala Perwakilan

Wahyu Priyono 👍

NIP. 197006011991031002



LAMPIRAN 10 CATATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGARA SATKER TAHUN 2017

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA BARANG TAHUNAN PERIODE TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat: dan
- 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- > Entitas Pelaporan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Periode Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

- Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat: dan
- 7) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.6/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan

- 1) Nilai Penyusutan
 - a) Aset Tetap

Nilai yang dapat disusutkan atas BMN yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1)) Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012, merupakan nilai buku per 31 Desember
- 2)) Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, merupakan nilai perolehan. Dalam hal ini perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.6/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.6/2013 dijelaskan bahwa penghitungan dan pencatatan atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005, maka:

- 1)) Penghitungan Penyusutan dilakukan sejak Semester I Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap;
- 2)) Pencatatan Penyusutan dalam Neraca dilakukan sejak penghitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan Aset Tetap dihapuskan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

b) Aset Tak Berwujud

Nilai yang dapat diamortisasi atas BMN yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 dibagi menjadi dua yaitu:

1)) Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015;

2)) Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset tak Berwujud. maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi.

- 2) Metode Penyusutan Yang Digunakan Penyusutan atas seluruh BMN berupa Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang menjadi objek penyusutan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 dan 251/PMK.06/2015 dilakukan dengan Metode Garis Lurus.
- 3) Masa Manfaat Yang Digunakan Masa manfaat atas BMN berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sedangkan masa manfaat atas BMN berupa Aset Tak Berwujud ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.6/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 4) Nilai Tercatat Bruto dan Akumulasi Penyusutan Penyajian Nilai Tercatat Bruto dan Akumulasi Penyusutan adalah sebagai berikut:

Total Aset			Rp	
Total Aset Lainnya			Rp	-
Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp	-		
Akumulasi Amortisasi Lisensi	Rp	-		
Lisensi	Rp	-		
Akumulasi Amortisasi Software Komputer	Rp	-		
Software Komputer	Rp	-		
Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp			
Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp	-		
Akumulasi Penyusutan Aset yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	Rp	_		
Aset yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	Rp		р	
Total Aset Tetap	1		Rp	
Konstruksi dalam Pengerjaan	-		Rp	
Nilai Buku Aset	1.4		Rp	
Akumulasi Penyusutan ATL & ATR	Rp	-		
Aset Tetap Lainnya dan Aset Tetap Renovasi	Rp	-		
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp			
Jalan, Irigas i dan Jaringan	Rp	-		
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	-		
Gedung dan Bangunan	Rp	-		
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	-		
Peralatan dan Mesin	Rp	-	Rp	
Barang Persediaan Tanah		-	Rp	-

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan Tahun Anggaran 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan esktrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2017 ini adalah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) dan nilai mutasi yang teriadi selama Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

- 1. Neraca;
- Laporan Barang Persediaan;
- 3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
- 4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- 5. Laporan Aset Tak Berwujud;
- 6. Laporan Barang Bersejarah;
- 7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
- 8. Laporan Penyusutan;
- 9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- 10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang:
- 11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS):
- 12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
- 13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN
- 15. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) eksternal (untuk LBMN yang diserahkan ke tingkat Wilayah (UAPPB-W) dan tingkat Eselon I (UAPPB-E1)); dan
- Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER TAHUN ANGGARAN 2017

1. Saldo awal Tahun Anggaran 2017

Nilai BMN per 01 Januari 2017 menurut Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017

Mutasi BMN per Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
117131	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
117199	Persediaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (nol rupiah) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (nol rupiah).

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	
-	-
-	-

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	
-	-
-	

Dari jumlah/nilai tanah diatas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Tanah yang statusnya dihentikan dari pengguna operasional pemerintah adalah $0 \text{ m}^2/\text{Rp}0.00.$

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu:

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m ²)	Nilai (Rp)
Sengketa	-	0,00
Tidak terdapat bukti kepemilikan	-	0,00
Dikuasai pihak lain	-	0,00

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	_

Mutasi Kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
	-	-
-	-	_

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Besar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabe (Rp)
-	-	-
		-
	-	-

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabe (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Angkutan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	_
-	-	-
-		-

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
_	-	-
-	-	_
-	-	

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4) Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabe (Rp)
-	-	-
-	-	-
	-	-

Mutasi Kurang Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Pertanian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Pertanian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Pertanian sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	_

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0.00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	

Mutasi Kurang Alat Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
•	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

7) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0.00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	•	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

8) Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit

dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Laboratorium sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

9) Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	•	-
N=	-	-
•	-	

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Persenjataan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

10) Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
•	-	-
-	-	+
	-	-

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	_	-

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	
Baik	0	
Rusak Ringan	0	
Rusak Berat	0	

Bidang barang Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Komputer sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

11) Alat Eksplorasi (3.11)

Saldo Alat Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-		-
-	-	-
_	-	-

Mutasi Kurang Alat Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	
-	-	-

Dari jumlah Alat Eksplorasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Eksplorasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Eksplorasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Eksplorasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

12) Alat Pengeboran (3.12)

Saldo Alat Pengeboran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Pengeboran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Pengeboran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabe (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Pengeboran di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Pengeboran di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Pengeboran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Pengeboran sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

13) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Saldo Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0.00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
÷.	-	-
-	-	_

Mutasi Kurang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

14) Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Saldo Alat Bantu Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bantu Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	
-		-

Mutasi Kurang Alat Bantu Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-		-
-	-	
-	-	-

Dari jumlah Alat Bantu Eksplorasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Bantu Eksplorasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	
Baik	0	
Rusak Ringan	0	
Rusak Berat	0	

Bidang barang Alat Bantu Eksplorasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Bantu Eksplorasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

15) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-		-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	_

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

16) Alat Peraga (3.16)

Saldo Alat Peraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Peraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
	-	_
•	-	-

Mutasi Kurang Alat Peraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Peraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Peraga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Peraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Peraga sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

17) Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

18) Rambu-Rambu (3.18)

Saldo Rambu-Rambu pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Rambu-Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Rambu-Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Rambu-Rambu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Rambu-Rambu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Rambu-Rambu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Rambu-Rambu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

19) Peralatan Olah Raga (3.19)

Saldo Peralatan Olah Raga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	4

Mutasi Kurang Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
	-	-
-	-	-
	-	-

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Peralatan Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Peralatan Olah Raga sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada bidang barang Bangunan Gedung sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Monumen (4.02)

Saldo Monumen pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Monumen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	/ -
-	-	85
-	-	

Mutasi Kurang Monumen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Monumen di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah).

Dari jumlah Monumen di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)
Baik	-
Rusak Ringan	-
Rusak Berat	-

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada bidang barang Monumen sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3. Bangunan Menara (4.03)

Saldo Bangunan Menara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bangunan Menara tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-		-
-	-	-

Mutasi Kurang Bangunan Menara tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-		-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Bangunan Menara di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Bangunan Menara di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada bidang barang Bangunan Menara sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4. Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada bidang barang Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi,dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1. Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 m²dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel Ekstrakomptal (Rp) (Rp)	
-	-	_
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
_		_

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi Kuantitas		
Baik	0	
Rusak Ringan	0	
Rusak Berat	0	

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi,dan Jaringan pada bidang barang Jalan dan Jembatan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Bangunan Air (5.02)

Saldo Bangunan Air pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bangunan Air tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-		-
-	-	-

Mutasi Kurang Bangunan Air tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
_	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Bangunan Air di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Bangunan Air di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	
Baik	0	
Rusak Ringan	0	
Rusak Berat	0	

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi,dan Jaringan pada bidang barang Bangunan Air sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3. Instalasi (5.03)

Saldo Instalasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
S +	-	-
-	-	-
-	-	

Mutasi Kurang Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Instalasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Instalasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	
Baik	0	
Rusak Ringan	0	
Rusak Berat	0	

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi,dan Jaringan pada bidang barang Instalasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4. Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
	-	-
-		-
-	-	-

Mutasi Kurang Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	<u>-</u>
-	_	-

Dari jumlah Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	
Baik	0	
Rusak Ringan	0	
Rusak Berat	0	

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi,dan Jaringan pada bidang barang Jaringan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-		-
-		-
-	-	-

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
	-	-

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (6.02)

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
2	-	-

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Obuah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses

penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

3. Hewan (6.03)

Saldo Hewan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Hewan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
*	-
-	-

Mutasi Kurang Hewan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
	-
	-

Dari jumlah Hewan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Hewan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

4. Ikan (6.04)

Saldo Ikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Ikan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
	-
-	-
	-

Mutasi Kurang Ikan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
	-
-	-

Dari jumlah Ikan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Ikan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

5. Tanaman (6.05)

Saldo Tanaman pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Tanaman tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
2	
-	-
-	-

Mutasi Kurang Tanaman tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah Tanaman di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Tanaman di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	
Baik	0	
Rusak Ringan	0	
Rusak Berat	0	

6. Barang Koleksi Non Budaya (6.06)

Saldo Barang Koleksi Non Budaya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Barang Koleksi Non Budaya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Barang Koleksi Non Budaya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Barang Koleksi Non Budaya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0buah dengan nilaj sebesar Rp0.00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Barang Koleksi Non Budaya di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	
Baik	0	
Rusak Ringan	0	
Rusak Berat	0	

7. Aset Tetap Dalam Renovasi (6.07)

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-		-
-	-	-

Mutasi Kurang Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	_
-	_	-

Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0.00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai	
	(Rp)	
-	-	
-	-	

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai	
	(Rp)	
-	-	
-	-	
-	-	

Dari jumlah KDP di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

h. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0.00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 0 buah/unit/m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah/unit/m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah/unit/m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
	-	-
_	-	-
-	-	

Mutasi Kurang Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0,00	0,00
2. Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
3. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan5. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-
-	
-	-

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari pengguna operasional pemerintah adalah 0 buah/Rp0,00.

Akumulasi Amortiasi Aset Tak Berwujud pada bidang barang Software Komputer dan Lisensi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
		-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaanya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	•	-
-	(*)	-
-	-	-

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 13 Desember 2017 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	
1. Tanah	0,00	0,00	
2. Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
3. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
4. Jalan, Jembatan, Irigasi	0,00	0,00	
5. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH	0,00	0,00	

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Uraian	Akumulasi Penyusutan (BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah)
132111 Peralatan dan Mesin	Rp0,00
133111 Gedung dan Bangunan	Rp0,00
134112 Irigasi	Rp0,00
134113 Jaringan	Rp0,00
135121 Aset Tetap Lainnya	Rp0,00
TOTAL	Rp0,00

i. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	0
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)	0

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (negatif)	0
Penghapusan Barang Bersejarah	0

3. Barang Milik Negara Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan Per 31 Desember 2017

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu:

Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakompt	abel	Ekstrakomptabel		Gabungan	
NO	Oraian Neraca	Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Sub Jumlah (1)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0,00	-	0,00	-	0,00	-
2	Peralatan dan Mesin	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3	Gedung dan	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Bangunan						
4	Jalan, Irigasi dan	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Jaringan						
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	-	0,00	-	0,00	-
6	KDP	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Sub Jumlah (2)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Ш	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan	0,00		0,00		0,00	
	Pihak Ketiga		-		-		-
2	Aset Tak Berwujud	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3	Aset yang dihentikan	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	dari penggunaan						
	operasional						
	Pemerintah						
	Sub Jumlah (3)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Tota	l (Sub Jumlah 1+2+3)	0,00	-	0,00	-	0,00	_

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomp	otabel	Ekstrakom	ptabel	Gabung	
INO	Oraian Neraca	Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	0,00	-	0,00	-	0,00	-
2	Gedung dan Bangunan	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Sub Jumlah (I)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00		0,00	-	0,00	-
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0,00	i e .	0,00	-	0,00	-
	Sub Jumlah (II)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
To	tal (Sub Jumlah I+II)	0,00		0,00		0,00	

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1.	Persediaan	0,00	0,00	0,00
2.	Tanah	0,00	0,00	0,00
3.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
4.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
6.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.	KDP	0,00	0,00	0,00
8.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
9.	Aset Lain-lain*)	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

^{*)} Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaanya dari operasional pemerintah.

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai **BMN** secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
INO.	reflode Laporan	INIIAI DIVIIN	Rupiah	Persen
1.	Tahunan Tahun 2012	0,00		
2.	Tahunan Tahun 2013	0,00	0,00	-
3.	Tahunan Tahun 2014	0,00	0,00	-
4.	Tahunan Tahun 2015	0,00	0,00	-
5.	Tahunan Tahun 2017	0,00	0,00	-

2. Informasi Pengelolaan BMN

Penetapan Status Penggunaan Barang

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaanya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1.	Tanah	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
3.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4.	Jalan	0,00	0,00
5.	Irigasi	0,00	0,00
6.	Jaringan	0,00	0,00
7.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggu- naan	Peman- faatan	Pemindah- tanganan	Pengha -pusan	Jumlah
1.	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	0	0	0	0	0
2.	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3.	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4.	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0
5.	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6.	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0
7.	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
8.	Selesai serah terima	0	0	0	0	0

Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-E1.

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle Oleh Pengelola	0
3	Peberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0

No	Uraian	Jumlah
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

3. BMN Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dan mengelola BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang.

Daftar satker yang sampai dengan 31 Desember 2017 masih mengelola BMN

vang berasal dari Dana Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

No.	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1	-	-	-	N#
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
	Total	-	-	-

Daftar satker yang sampai dengan 31 Desember 2017 masih mengelola BMN

vang berasal dari Dana Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

No.	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1	-	-	_	-
2	-	-	-	-
3	-	_	-	-
	Total	0,00	-	-

4. BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU)

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data Badan Layanan Umum (BLU) dan informasi penyusutan satker BLU, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Satker BLU	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	_	-	_	-
	Total	-	-	-

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

5. BMN dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999)

Terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-lain pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

6. Informasi Terkait Bmn Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

a. Daftar Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00

b. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0.00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp0.00 (nol rupiah) dan BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 dan disajikan sebagai Daftar Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00

7. BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang

Tahunan per 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00

8. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat Yang Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00

9. BMN Berupa Barang Permerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00.

10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak Ada

11. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Tidak Ada

Penanggung Jawab Laporan barang Kuasa pengguna Barang Tahunan Tahun Anggaran 2017 Kuasa Pengguna Barang

Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Aka NIP 197006011991031002

004.02.2300.890615.KD



LAMPIRAN 11

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA PER 31 DESEMBER 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN B. P. K. PUSAT BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2017 TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615.000 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tanggal : 03-01-2018 Halaman : 1 Kode Lap. : LBAPKT

AKUN NERACA		JUMLAH	
KODE	URAIAN		
1	2	3	
	TIDAK ADA DATA		
	JUMLAH		

Mataram, 31 Desember 2017 Penanggung Jawab UAKPB Kepala Perwakilan

Wahyu Priyono S.E., M.W., CA NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 12

LAPORAN BARANGKUASA PENGGUNA TAHUNAN-INTRAKOMPTABEL TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tanggal ; 03-01-2018

Halaman . 1

Kode Lan : LBSISSKT

AKUN N	ERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT		O PER		M	UTASI		SALD	O PER
			1 JANUA	RI 2017	BERTAM	BAH	BERKUE	RANG	31 DESEMBER 201	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			o		0 0		0 0	0	0	
	TIDAK ADA DATA		0		0 0		0 0	o	0	
	TOTAL				0		0	o		

Mataram, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala Perwakilan



LAMPIRAN 13 LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN – *EKSTRAKOMPTABEL* TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN EKSTRAKOMPTABEL RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 03-01-2018 Halaman :

NAMA UAKPB: 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kode Lap. : LBSESSKT

AKUN N	ERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALD	O PER		MUT	TASI		SALDO	PER	
14(01)11	Electroses Appenia on Britaino	0711	1 JANUARI 2017 BERTAMBAH BERKURANG		1 JANUARI 2017		BERTAMBAH BERKURANG		RANG	31 DESEME	BER 2017
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			o	0	0	0	o	0	0		
	TIDAK ADA DATA		o	0	0	0	o	0	0		
	TOTAL			0		0		0			

Mataram, 31 Desember 2017 Penanggung Jawab UAKPB

Kepala Perwakilan



LAMPIRAN 14

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN – GABUNGAN *INTRAKOMPTABEL* DAN E*KSTRAKOMPTABEL* TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB: 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tanggal : 03-01-2018 Halaman : 1

Kode Lap. : LBSGSSKT

AKUNN	KUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER			M		SALDO PER		
70.01.11	EUROPOOD VOD KELONII OK DAKANO	SAT	1 JANUA	RI 2017	BERTAN	IBAH	BERKURANG		31 DESEMBER 201	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0		0		0 0		0 0	
	TIDAK ADA DATA		o	-	0 0		0 0		0 0	
	TOTAL				a		0		0	

Mataram, 31 Desember 2017 Penanggung Jawab UAKPB Kepala Perwakilan



LAMPIRAN 15 LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN – BARANG BERSEJARAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN BARANG BERSEJARAH RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB: 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tanggal : 03-01-2018 Halaman : 1

Kode Lap. : LBSSSSKT

	AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER	MUTA	SI IS	SALDO PER
	The state of the s	5/11	1 JANUARI 2017	BERTAMBAH	BERKURANG	31 DESEMBER 2017
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7
			0	0	0	
	TIDAK ADA DATA		0	0	0	

Mataram, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAKPB Kepala Perwakilan



LAMPIRAN 16 LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN— ASET TAK BERWUJUD TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN ASET TAK BERWUJUD RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB: 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tanggal : 03-01-2018 Halaman : 1

Kode Lap, : LBSTSSKT

AKTIN N	ERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO	O PER		MU	TASI		SALDO PER	
ALCOIN IN	ELOCATOD DOD REDOMI OK BAICANG	JAI	I JANUA	1 JANUARI 2017		BERTAMBAH		RANG	31 DESEMBER 2017	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			o		0	o	0	o	0	
	TIDAK ADA DATA		o	(0	0	o	o	0	
	TOTAL			(0		0		

Mataram, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAKPB Kepala Perwakilan



LAMPIRAN 17 LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANKONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 03-01-2018 Halaman : 1

Kode Lap. : LBSKSSKT

NAMA UAKPB: 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN N	NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	JUMLAH SD 1 JANUARI 2017	PENAMBAHAN	KDP YG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH SD 31 DESEMBER	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
			0	a	o	
	TIDAK ADA DATA	0	0	0	0	
	TOTAL	o	0	o	0	

Mataram, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAKPB Kepala Perwakilan



LAMPIRAN 18 LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN— INTRAKOMPTABEL TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 03-01-2018 Halaman : 1

Kode Lap. : LPSISSKT

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB: 004.02,23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN N	ERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT			SALDO	PER 31 DESEMBER 20	17		
KODE	URAJAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	0	0	0	0	0	
	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	
	TOTAL			0	0	0	0	o	

Mataram, 31 Desember 2017 Penanggung Jawab UAKPB Kepala Perwakilan

Ahvu Priyono S.E., M.M., CA, A



LAMPIRAN 19 LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN- EKSTRAKOMPTABEL TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 03-01-2018

Halaman 1

Kode Lap. : LPSESSKT

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN EKSTRAKOMPTABEL RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NI	ERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	Y .		SALDO	PER 31 DESEMBER 20	17		
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S. D. PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	0	0	0	0	0	
	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	
	TOTAL			0	0	0	0	0	

Mataram, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAKPB Kepala Perwakilan



LAMPIRAN 20

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANGABUNGAN INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal 03-01-2018 Halaman 1

aman 1

Kode Lap. LPSGSSKT

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL, DAN AMORTISASI RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB: 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NI	ERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT			SALDO	PER 31 DESEMBER 20	17		
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK PENYUSUTAN S D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0		0 0	0	0	0	
	TIDAK ADA DATA		0		0 0	0	0	0	
	TOTAL				0 0	o	0	0	

Mataram, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAKPB Kepala Perwakilan

/ahyu Priyono S.E., M.M., CA, / NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 21 LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN ASET TAK BERWUJUD TAHUN ANGGARAN 2017



LAMPIRAN 22 LAPORAN BARANG HILANG YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSAN KEPADA PENGELOLA BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN BARANG HILANGTAHUNAN YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB: 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tanggal : 03-01-2016 Halaman : 1

Kode Lap.: LBMNHISSKT

AKUNN	ERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALD			SALDO PER		MU		SALDO	PER
AUCH	EICHEROOD OOD KELEOMI OK BAKAING	JA.	1 JANUA	RI 2017	BERTAM	(BAH	BERKUR	RANG	31 DESEMBER 2017		
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	
			0		0 0			(0		
	TIDAK ADA DATA		0		0 0		0	(0		
	TOTAL				o	c					

Mataram, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAKPB Kepala Perwakilan



LAMPIRAN 23

LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSAN KEPADA PENGELOLA BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 03-01-2018 Halaman : 1

NAMA UAKPB: 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kode Lap.: LBMNHISSKT

AKUNN	UN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER			MU		SALDO PER		
74401171	ELECTION OF DAKANG	SAT	1 JANUA	RI 2017	BERTAM	1BAH	BERKURANG		31 DESEMBER 20	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			o	0	0		0		0 0	
	TIDAK ADA DATA		o	0	0		0		0 0	
	TOTAL			0			o		o	

Mataram, 31 Desember 2017 Penanggung Jawab UAKPB

Kepala Perwakilan



LAMPIRAN 24
LAPORAN KONDISI BARANG
PER 31 DESEMBER 2017

LAPORAN KONDISI BARANG Per Sunday, December 31, 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

B. P. K. PUSAT

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NAMA UAKPB: BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE UAKPB: 004.02.23.890615,000

Tanggal : 03-01-2018

Halaman : 1

Kode Lap.: LKBT- PKPB1

No.		Sub-Sub Kelompok		C-1		Kondisi				
NO.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Satuan	Harga Perolehan —	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	X.XX.XX.XX.		C) -	0	0	0			
	Jumlah				0	0	0			

Mataram, Sunday, December 31, 2017

Kepala Perwakilan

NIP 197006011991031002

LAPORAN KONDISI BARANG **RUSAK RINGAN** Per Sunday, December 31, 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

B. P. K. PUSAT

No.

1

Jumlah --

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NAMA UAKPB: BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE UAKPB : 004.02.23.890615.000

Kode Barang

2

1 X . XX . XX . XX .

Tanggal : 03-01-2018

0

Halaman :

0

Kode Lap.: LKBT- PKPB3 Sub-Sub Kelompok Jumlah NUP Satuan Harga Perolehan Nama Barang Barang 4 5 6 0 0 0

> Mataram, Sunday, December 31, 2017 Kepala Perwakilan

Wahyu Priyorlo S.E. M.M., CA, Ak. NIP 197006011991031002

LAPORAN KONDISI BARANG **RUSAK BERAT** Per Sunday, December 31, 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

B. P. K. PUSAT

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NAMA UAKPB : BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE UAKPB : 004.02.23.890615.000

Tanggal 03-01-2018 Halaman 1

Kode Lap.: LKBT- PKPB4

No.	Sub-Sub Kelompok				Jumlah	Harga Perolehan	
140.	Kode Barang	de Barang N U P Satuan	Satuan	Barang			
1	2	3	4	5	6	7	
1	X.XX.XX.XX.		0		0		
Jum	lah				0		

Mataram, Sunday, December 31, 2017 Kepala Perwakilan

Wahyu Priyond S.E., M.M., CA, Ak)
NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 25 BERITA ACARA STOCK OPNAME PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2017

BERITA ACARA

PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN NOMOR: 02b/BAP/Persediaan/XIX.MTR.1.4/12/2017

Pada hari ini Minggu tanggal 31 bulan Desember tahun 2017 (31-12-2017), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama

Adhitya Megananda

NIP

198702152011051001

Unit Kerja

Subbagian Umum dan TI

II. Nama

Fahruddin

NIP

198611172009011004

Unit Kerja

Subbagian Umum dan TI

Telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan di lingkungan satuan kerja BPK RI Pusat c.q. Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (004.02.2300.890615) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (hasil pemeriksaan fisik terlampir)

Hasil pemeriksaan fisik akan digunakan sebagai dasar /bahan untuk penyusunan Laporan Barang Milik Negara tingkat satuan kerja BPK RI Pusat dan tingkat Eselon I serta Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Demikian berita acara ini dibuat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petugas Pemeriksa Fisik,

Petugas I

Nama: Adhitya Megananda

NIP. 198702152011051001

PetugasII

Nama : Fahruddin

NIP. 198611172009011004

Mengetahui,

Kepala Subbagian Umum dan TI

Nam : Deny Wirahmana NIP. 196510131985031003

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan Nomor : 02b/BAP/Persediaan/XIX.MTR.1.4/12/2017 Tanggal : 31 Desember 2017

KODE 1	Nama Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah	Kondisi
1	ALAT TULIS	3	4	5=3x4	6
000001				0	
000002	- Balpoit gel - Stabilo	0	0	0	
000003	- Balpoin Artline	0	0	0	
000004	- Label Ring	0	0	0	
000006	- Pensil	0	0	0	
000007	- Spidol Artline	0	0	0	
800000	- Clear File	0	0	0	
000009	- Pulpen Pilot	0	0	0	
000010	- Pulpen	0	0	0	
000011	- Stabilo	0	0	0	
000011	- Balpoint Balliner	0	0	0	
000012	- Pulpen Snowman	0	0	0	
00014	- Ballpoint Hitam	0	0	0	
00015	- Spidol Permanen	0	0	0	
00016		0	0	0	
00017	- Spidol White Board - Pulpen BPK	0	0	О	
000017		0	0	0	
00019	- Pensil Mekanik BPK - Pensil Mekanik	0	0	0	
00019	- Ballpoint Meja	0	0	0	
00020	- Isi Pensil Mekanik	0	0	o	
00021	- Pulpen Standart	0	0	0	
00022	TINTA TULIS, TINTA STEMPEL	0	0	0	
00001	- Tinta Stempel			0	
00002	- Stempel	0	0	0	
00002	PENJEPIT KERTAS	0	0	0	
00001	- Trigonal Clip No. 3	-		. 0	
00002	- Binder Clip No. 107	0	0	0	***************************************
00003	- Binder Clip No. 105	0	0	0	
00004	- Binder Clip 200 Joyco	0	0	0	
00005	- Binder Clip 155	0	0	0	
00006	- Binder Clip 260	0	0	0	
00009	- Klip No. 1	0	0	0	
00011	- Isi Stapler No. 10	0	0	0	
00012	- Binder Clip 111	0	0	0	
00013	- Stapler HDD 330	0	0	0	
00014	- Paper Clip	0	0	0	
00015	- Paper Clip Warna	0	0	0	
	PENGHAPUS/KOREKTOR	0	0	0	
00001	- Penghapus White Board			0	
00002	- Tip Ex	0	0	0	
00003	- Penghapus Pensil	0	0	0	
	BUKU TULIS	0	0	0	
00001	- Buku Folio	01	- 10	0	
00002	- Notes	0	0	0	
00003	- Note BPK	0	0	0	
00004	- Buku Kuarto		0	0	
	ORDNER DAN MAP	0	0	0	
00001	- Stopmap Folio	61	71	0	
00002	- Map Resleting A3	0	0	0	
00003	- Map Resleting A5	0	0	0	
00004	- Map Resleting A6	0	0	0	
00005	- Ordner	0	0	0	
	STATES.	0	0	0	

KODE	Nama Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5=3x4	6
000006	- Map Plastik	0	0	0	
000007	- Map Kancing	0	0	o	
800000	- Box File	0	0	o	
000009	- Map Batik	0	0	o	
000010	- Map Bisnis File	0	o	o	
000011	- Map Jepit	0	0	o	
000012	- Map Zipper	0	o	-1	
	PENGGARIS		9	0	
000002	- Penggaris BPK	0	- 0	0	
	CUTTER (ALAT TULIS KANTOR)	9	0	0	
000001	- Gunting			0	
000002	- Cutter	0	0	0	
	ALAT PEREKAT	0		0	
000002	- Lakban			0	
000003	- Lem	0	0	0	
000004		0	0	0	
	- Stiker Label	0	0	0	
000005	- Lakban Bening	0	0	o	
000006	- Selotip	0	0	0	
000007	- Double Tape	0	0	ol	
800000	- Lem Alteco	0	0	0	
000009	- Double Tape Kecil	0	0	0	
000010	- Selotip Kecil	0	0	0	
000011	- Lakban Cokelat	o	0	0	
	STAPLES		٧		
000001	- Stapler No. 10	0		0	
	ISI STAPLES	9	0	0	
000001	- Isi Staples HD 330			0	
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA	0	0	0	
000001	- Post It Besar			0	
000002	- Post It Pembatas	0	0	0	
000003	- Name Card Holder	0	0	0	
000005		0	0	0	
	- Pen Holder	0	0	0	
000006	- Pembolong Kertas Besar	0	0	0	
000007	- Post It-Sign Here	0	0	0	
80000	- Post It 657	0	0	0	
00009	- Post It 654	0	0	0	
00010	- Pelubang Kertas	0	o	0	
00011	- Rautan Meja	0	0	0	
00012	- Tempat Pensil BPK	0	o	ol	
00013	- Clipboard	0	0	0	
00014	- Pelubang Kertas Single	0	o	0	
00015	- Post It Kecil	0	0		
00016	- Post It	0	0	0	
00017	- Cardboard (Pembatas)			0	
* P. P. S. T. L.	KERTAS HVS	0	0	0	
00001	- Kertas HVS Warna	21		0	
	BERBAGAI KERTAS	0	0	0	
00001	- Kertas A4			0	
00001	- Kertas Kado	0	0	0	
00002		0	0	0	
	- Kertas F4	0	0	0	
00004	- Kartu Ucapan	0	0	0	
00005	- Continuous Form 5 Ply	0	0	0	
00006	- Kertas Concorde Biru	0	0	0	
00007	- Kertas HVS Biru	0	o	ol	
80000	- Kertas Concorde	0	o	0	
00009	- Kertas Folio	0	o	o	
00010	- Kertas Foto	0	0		
	KERTAS COVER	- V	U	0	
	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF				

1	Nama Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah	Kondisi
	AMPLOP 2	3	4	5=3x4	6
000001	- Amplop Putih			0	
000002	- Amplop Besar	0	0	0	
***************************************	COMPUTER FILE/TEMPAT DISKET	0	0	0	
000001	- Album Zip CD			0	
	TINTA/TONER PRINTER	0	0	0	
000001	- Cartridge 85 A Black			0	
000002	- Cartridge 53A	0	0	0	
000003	- Cartridge 05A Rekondisi	0	0	0	
000004	- Cartridge 35A	0	0	0	
000005	- Cartridge 950 XL Black	0	0	0	
000006	- HP Toner Cartridge CF 280A (80A Black)	0	0	0	
000007	- Toner Cartridge 131A Cyan	0	0	0	
800000	- Toner Cartridge 131A Magenta	0	0	0	
000009	- Toner Cartridge 131A Black	0	0	0	
000010	- Toner Cartridge 131A Yellow	0	0	0	
000011	- Toner Cartridge HP 951 XL Cyan	0	0	0	
000012	- Toner Cartridge HP 951 XL Magenta	0	0	0	
000013	- Toner Cartridge HP 951 XL Yellow	0	0	0	
000014	- Cartridge Epson LQ-310	0	0	0	
000015	- Toner HP CE 410A (305 Black)	0	0	0	
000016	- Toner HP CE 411A (305A Cyan)	0	0	0	
000017	- Toner HP CE412A (305A Yellow)	0	0	0	
000018	- Toner HP CE413A (305A Magenta)	0	0	0	
000019	- Toner HP CB435A (35A Black)	0	0	0	
000020	- Toner HP CE285A (85A Black)	0	0	0	
000021	- Toner HP CE505A (05A Black)	0	0	0	
000022	- Toner HP Q7553A (53A Black)	0	0	0	
000023	- Refill Toner HP CF280A (80A Black)	0	0	0	
000024	- Refill Toner HP CB435A (35A Black)	0	0	0	
000025	- Refill Toner HP Q7553A (53A Black)	0	0	0	
000026	- Refill Toner HP CE505A (05A Black)	0	0	0	
000027	- Refill Toner HP 131A Black	0	0	0	
000028	- Refill Toner HP 131A Cyan	0	0	0	
000029	- Refill Toner HP 131A Yellow	0	0	0	
000030	- Refill Toner HP 131A Magenta	0	0	0	
000031	- Refill Toner HP CE 411A (305A Cyan)	0	0	0	
	USB/FLASH DISK	0	0	0	
000001	- Flash Disk 32 GB			0	
000002	- Flashdisk 8 GB	0	0	0	
000003	- Flashdisk 16 GB	0	0	0	
000004	- Flashdisk	0	0	0	
	KARTU MEMORI	0	0	0	
000001	- Micro SDHC	- 0		0	
000002	- Memory Card 32 GB	0	0	0	
	MOUSE	- 0	0	0	
00001	- Wireless Mouse	- 0		0	
	BATU BATERAI	0	0	0	
00001	- Baterai A2	Ol Ol		0	
00002	- Baterai A3		0	0	
000003	- Baterai A3	0	0	0	
00004	- Baterai R-2	0	0	0	
A. P. A. P. A. L.	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	0	0	0	
	- Gantungan Kunci	- 0		0	
00002	- Kotak LHP Besar	0	0	0	
00003	- Kotak LHP Kecil	0	0	9	
00004	- Push Pin	0	0	0	
	- Isi Cutter	0	0	0	
00005 I		0	0	0	
00005 00006	- Plastik Samoul	2.1			
00006	- Plastik Sampul - Pembatas Dokumen 25	0	0	0	
00006 00007	- Plastik Sampul - Pembatas Dokumen 25 - Pembatas Dokumen 40	0	0	0	

KODE	Nama Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5=3x4	6
000010	- Kotak Post It - Kotak LHP Sedang	0	0	0	
	Jumlah			0	

Petugas Pemeriksa Fisik,

Petugas I

Adhitya Megananda NIP 198702152011051001

Fahruddin NIP 198611172009011004

Mengatahui, Kasubbag Umum dan TI Perwakilan Provinsi NTB

Deny Wirahmana

NIP 196510131985031003



LAMPIRAN 26 LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2017

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN

PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB : BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE UAKPB : 004.02.23.890615.000.KD

Kode	Uraian	
	NIHIL	0
	TOTAL	0

Penanggung Jawab UAKPB Kepala Perwakilan

Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, NIP 197006011991031002

Mataram, 31 Desember 2017 Petugas Pengelola Persediaan

> Adhitya Megananda 198702152011051001



LAMPIRAN 27 LAPORAN REKENING PEMERINTAH

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT

LAPORAN REKENING PEMERINTAH BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT

PER 31 DESEMBER 2017

LAPORAN REKENING PEMERINTAH BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT

Laporan rekening pemerintah ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE-94/PB/2007 tentang Pelaporan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara Tingkat Satuan Kerja. Dengan demikian, laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan kementerian negara/lembaga/satuan kerja.

Selain itu, laporan ini juga disusun agar pihak-pihak yang terkait dapat mengetahui secara jelas dan transparan seluruh rekening yang dikuasai oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun daftar Rekening Pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat adalah sebagai berikut: KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

SATUAN KERJA: BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT (01.890615)

Kategori Rekening: Rekening Bendahara Pengeluaran

DAFTAR REKENING YANG DIPERTAHANKAN

Nomor Urut	IDENTITAS	IDENTITAS REKENING				Tujuan	Saldo per 31 D	esember 2017		Persetujuan
	Nomor Rekening	Nama Rekening	NAMA BANK	KELOMPOK REKENING	SATKER	Pembukaan Rekening	US Dollar	Rupiah	Status	KPPN pemberi persetujuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0369530256	Bpg 038 BPK Perwakilan Provinsi NTB	PT. Bank Negara Indonesia	Rekening Pemerintah	890615	Untuk keperluan menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran		0,00	Aktif	KPPN Mataram
	Jumlah							0,00		

Mataram, 12 Januari 2018 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat

Wahyu Priyono



LAMPIRAN 28

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KAP PER 31 DESEMBER 2017

PROGRESS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KAP. SRIYADI ELLY SUGENG & REKAN TAHUN 2016 LAPORAN KEUANGAN BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT TAHUN 2017

NO.	TEMUAN	KLASIFIKASI TEMUAN		RENCANA	JADWAL	PROGRES PER 31	UNIT PNG.		
	PEMERIKSAAN I		Н	Ш	TINDAK LANJUT	PENYELESAIAN	DESEMBER 2017	JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-		-	-	-		*		-

Mataram, 12 Januari 2018 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat

Wahyu Priyono



LAMPIRAN 29 BERITA ACARA REKONSILIASI



Nomor: BAR-160147/WPB.21/KP.038/2017

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (890615) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MATARAM, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	7,947,958,000	7,947,958,000	0
2	Belanja	7,613,438,590	7,613,438,590	0
3	Pengembalian Belanja	-218,399,857	-218,399,857	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

> Darojat Imam Wijaya NIP.197604021996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran, Plt. Kepala Perwakilan



Nomor: BAR-144493/WPB.21/KP.038/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (890615) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MATARAM, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Nopember 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	7,947,958,000	7,947,958,000	0
2	Belanja	7,074,485,993	7,074,485,993	0
3	Pengembalian Belanja	-203,585,757	-203,585,757	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	200,000,000	200,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	200,000,000	200,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

> Darojat Imam Wijaya NIP.197604021996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran, Plt. Kepala Perwakilan



Nomor: BAR-122816/WPB.21/KP.038/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (890615) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MATARAM, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Oktober 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	7,947,958,000	7,947,958,000	0
2	Belanja	6,515,604,841	6,515,604,841	0
3	Pengembalian Belanja	-167,416,825	-167,416,825	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	200,000,000	200,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	200,000,000	200,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

> Darojat Imam Wijaya NIP.197604021996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran, Plt. Kepala Perwakilan



Nomor: BAR-103295/WPB.21/KP.038/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (890615) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MATARAM, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode September 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	7,947,958,000	7,947,958,000	0
2	Belanja	5,533,283,325	5,533,283,325	0
3	Pengembalian Belanja	-157,416,825	-157,416,825	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	200,000,000	200,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	200,000,000	200,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

> Darojat Imam Wijaya NIP.197604021996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran, Plt. Kepala Perwakilan



Nomor: BAR-82090/WPB.21/KP.038/2017

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (890615) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MATARAM, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan berupa berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan berupa beru

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	7,947,958,000	7,947,958,000	0
2	Belanja	5,039,199,964	5,039,199,964	0
3	Pengembalian Belanja	-149,872,935	-149,872,935	0
4	Estimasi Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	200,000,000	200,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	200,000,000	200,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

> Darojat Imam Wijaya NIP.197604021996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Kepala Perwakilan

Wahyu Priyono NIP.197006011991031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



Nomor: BAR-51183/WPB.21/KP.038/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (890615) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MATARAM, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Juli 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	7,947,958,000	7,947,958,000	0
2	Belanja	4,370,922,337	4,370,922,337	0
3	Pengembalian Belanja	-120,760,435	-120,760,435	0
4	Estimasi Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	200,000,000	200,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	200,000,000	200,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

> Darojat Imam Wijaya NIP.197604021996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Kepala Perwakilan

Wahyu Priyono NIP.197006011991031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



Nomor: BAR-40225/WPB.21/KP.038/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (890615) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MATARAM, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Juni 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	7,947,958,000	7,947,958,000	0
2	Belanja	4,047,276,561	4,047,276,561	0
3	Pengembalian Belanja	-120,760,435	-120,760,435	0
4	Estimasi Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	200,000,000	200,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	200,000,000	200,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

> Darojat Imam Wijaya NIP.197604021996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran, Plt. Kepala Perwakilan



Nomor: BAR-6746/WPB.21/KP.038/2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (890615) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MATARAM, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Mei 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	7,947,958,000	7,947,958,000	0
2	Belanja	3,633,414,751	3,633,414,751	0
3	Pengembalian Belanja	-107,140,226	-107,140,226	0
4	Estimasi Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	200,000,000	200,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	200,000,000	200,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

> Darojat Imam Wijaya NIP.197604021996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran, Plt. Kepala Perwakilan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA KPKNL MATARAM

Jalan Pendidikan 24 Mataram

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (004022300890615000KD) PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR: BAR-018/WKN.14/KNL.03/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan belas , bertempat di KOTA MATARAM, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Septsonno

NIP

197409011995031003

: Kasi PKN KPKNL Mataram

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada KPKNL MATARAM untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama

: Wahyu Priyono

NIP -

197006011991031002

: Kepala Perwakilan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab unit akuntansi barang pada BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (004022300890615000KD) untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (004022300890615000KD) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Barang Milik Negara / Kantor Daerah (LBMN-KD) untuk periode Tahunan . Tahun Anggaran 2017, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

NO	AKUN NERACA	Nilai BMN Periode Tahunan Tahun 2017				
	ARON NERACA	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	POSISI BMN DI NERACA	0	0			
Α	ASET LANCAR	0	0			
1	Persediaan 1)	0	0]		
В	ASET TETAP	0	0			
1	Tanah	0	0			
2	Peralatan dan Mesin	0	0			
3	Gedung dan Bangunan	0	0			
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0			
5	Aset Tetap Lainnya	0	0			
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0			
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0			
C	ASET LAINNYA	0	0			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0			
2	Aset Tidak Berwujud	0	0			
3	Akumulasi Amortisasi	0	0			
4	Aset Lain-lain 2)	0	0			
5	Akummulasi Penyusutan atas Aset Lainnya	0	0			
6	Akumulasi Amortisasi	0	0			
II	BMN NON NERACA	0	0			
Α	EKSTRAKOMPTABEL	0	0			
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	The second second		
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0			
В	BPYBDS	0	0			
С	BARANG HILANG	0	0			
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0			
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011	0	0			
	TOTAL I + II	0	0	The second second		

3) Rincian terlampir.

Nilai Mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;
 Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN;



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA KPKNL MATARAM

Jalan Pendidikan 24 Mataram

-2-

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Tahunan Tahun 2017, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

NIP.197006011991031002

") pilih salah satu yang paling sesuai



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA KPKNL MATARAM

Jalan Pendidikan 24 Mataram

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (004022300890615000KD) PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2017

I. REKONSILIASI SALDO AWAL DATA BARANG MILIK NEGARA

PERKIRAAN NERACA		SALDO AWAL SEBELUM	KOREK	(SI	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	
KODE URAIAN		KOREKSI	TAMBAH	KURANG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ı	POSISI BMN DI NERACA	0	0	0	0	
11	ASET LANCAR	0	0	0	0	
1171	Persediaan 1)	0	0	0	0	
13	ASET TETAP	0	0	0	0	
1311	Tanah	0	0	0	0	
1321	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	
1371	Akum. Penyusutan	0	0	0	0	
1331	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	
1372	Akum. Penyusutan	0	0	0	0	
1341	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	
1373	Akum. Penyusutan	0	0	0	0	
1351	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	
1374	Akum. Penyusutan	0	0	0	0	
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
16	ASET LAINNYA	0	0	0	0	
1611	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	
169111	Akum, Penyusutan	0	0	0	0	
162	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	
16931	Akum, Amortisasi	0	0	0	0	
1661	Aset Lain-lain 2)	0	0	0	0	
169122	Akum, Penyusutan	0	0	0	0	
16932	Akum, Amortisasi	0	0	0	0	
II	BMN NON NERACA	0	0	0	0	
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0	
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0	0	
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0	0	
В	BPYBDS	0	0	0	0	
С	BARANG HILANG	0	0	0	0	
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0	
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011	0	0	0	0	
	TOTAL I + II	0	0	0	0	

1) Nifai koreksi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara sa	ldo awal setelah koreksi dan saldo awal sebelum koreksi;
2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunaka	n Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak
Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berup	a BMN.
Total nilai koreksi saldo awal sebesar Rp	dengan penjelasan sebagai berikut:

b.

II. PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN PERIODE BERJALAN

a. Pemutakhiran dan Mutasi Barang Milik Negara

	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL	MUTA	SI	SALDO AKHIR
KODE	URAIAN	Per 01-01-2017	TAMBAH	KURANG	Per 31-12-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	POSISI BMN DI NERACA	0	0	0	0
11	ASET LANCAR	0	0	0	0
1171	Persediaan 1)	0	0	0	0
13	ASET TETAP	0	0	0	0
1311	Tanah	0	0	0	0
1321	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
1371	Akum, Penyusutan	0	0	0	0
1331	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
1372	Akum, Penyusutan	0	0	0	0
1341	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
1373	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1351	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
1374	Akum, Penyusutan	0	0	0	0
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
16	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1611	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
169111	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
162	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
16931	Akum. Amortisasi	0	0	0	0
1661	Aset Lain-lain 2)	0	0	0	0
169122	Akum, Penyusutan	0	0	0	0
16932	Akum, Amortisasi	0	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0	0
В	BPYBDS	0	0	0	0
С	BARANG HILANG	0	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011	0	0	0	0
	TOTAL I + II	0	0	0	0

b. Rekonsiliasi Data Transaksi Pembentuk BMN yang berasal dari APBN

No	Nilai	Belanja Modal	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0	0	0

[&]quot;) Nilai yang disajikan hanya-dari transaksi yang terkait dengan pengeluaran APBN dengan SPM/SP2D seperti Pembelian, Penyelesaian Pembangunan Langsung, Pengembangan Nilai Aset, Perolehan/Penambahan KDP, dan Pengembangan KDP

c. Rekonsiliasi Data Transaksi Pembentuk BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dan Pengurang BMN

i. Mutasi Tambah BMN

No	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			0	0
	TOTAL			

Nilai mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;
 Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN.

ii. Mutasi Kurang BMN

No	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			0	0
	TOTAL			

iii. Penyusutan BMN berupa Aset Tetap

No.	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(5)
	TOTAL		

iv. Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud

No.	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(5)
	TOTAL		

III. REKONSILIASI PENGELOLAAN BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

No	Uraian	Belum Ditetapkan Sta	tus Penggunaan	Telah Ditetapkan Status Penggunaan		
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
1	Tanah	0	0	0	0	
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	
4	Jalan	0	0	0	0	
5	Irigasi	0	0	0	0	
6	Jaringan	0	0	0	0	
7	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	
	JUMLAH	0	0	0	0	

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	C
2	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	C
3	Dalam Proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4	Selesai Di Pengelola Barang (Dikembalikan)	o	0	0	0	0
5	Selesai Di Pengelola Barang (Ditolak)	0	0	0	0	0
6	Selesai Di Pengelola Barang (Disetujui)	0	0	0	0	0
7	Dalam Proses tindak lanjut pengguna/kuasa pengguna barang	0	0	0	0	0
8	Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0
9	Tindak Lanjut Oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
10	Selesai Serah terima	0	0	0	0	0
11	Gagal/Batal Proses	0	0	0	0	0

IV. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Tahunan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

PNBP DARI SATKER

Vo.	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan Nilai PNBP	Nilai PNBP

PNBP DARI APLIKASI SIMPONI

No.	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan Nilai PNBP	Nilai PNBP

V. INFORMASI PENTING LAINNYA

a.	Permasalahan	vano teriad	i dalam	nelakeanaan	penatausahaan	DIANI

No	Uralan	

 Langkah tindak lanjut ke depan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan penatausahaan BMN adalah :

No	Uraian	

c. Tindak lanjut temuan BPK terkait BMN :

No	Uraian	

d. Terdapat Perbedaan Nilai BMN antara BPK RI PERWAKILAN NTB dengan KPKNL yang disebabkan :

No.	Uraian	

PIHAK KEDUA,

/ Wahyu Priyono

NIP.197006011991031002

NIP-197403011995031003



LAMPIRAN 30 DAFTAR SSBP UNTUK PENYETORAN SISA UP TAHUN 2017 DAN DAFTAR PENYETORAN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER 31 DESEMBER 2017 KE KAS NEGARA

DAFTAR SSBP UNTUK PENYETORAN SISA UP DAN PENYETORAN KAS LAIN SETARA KAS TA 2017

Kementerian/Lembaga

: BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BA 004)

Satuan Kerja

: BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT (02.2300.890615)

No.	NTPN	Tanggal Dokumen	KPPN	Akun	Jumlah (Rp)	Keterangan
		Jumlah				

Mataram, 12 Januari 2018 Kepala Sun Bagian Keuangan

Mohamad Zahruddin NIP. 196804301994031004



LAMPIRAN 31 FOTOKOPI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2017

Form LPJ Pengeluaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan: Desember 2017

Tahun Anggaran 2017

Kementerian/Lembaga:

004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Unit Organisasi Provinsi/Kab/Kota 02 B. P. K. PUSAT

Satuan Kerja

51 KOTA MATARAM

Alamat dan Telp.

890615) BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No Krws & Kewenangan: (

Jalan Udayana Nomor 22 Mataram

Dokumen

0001.KD) Kantor Daerah

) DIPA 01

Nomor Dokumen

DIPA-004.02.2.890615/2017

Tanggal Dokumen Tahun Anggaran

07-12-2016

2017

KPPN

038

) MATARAM

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor: K00347

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
A.	BP Kas, BPP, dan UM Perjadin	96.266.826	770 240 007	97F F07 922	(6)
۸.			779.240.997	875.507.823	
	BP Kas (tunai dan bank)	55.547.905	779.240.997	834.788.902	(
	BP Uang Muka/Voucher	40.718.921	0	40.718.921	- (
	3. BP BPP (Kas pada BPP)	0	0	0	(
B.	BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin	96.266.826	345.283.413	441.550.239	(
	1. BP UP *)	96.266.826	184.058.477	280.325.303	(
	2. BP LS-Bendahara	0	159.180.186	159.180.186	(
	3. BP Pajak	0	2.044.750	2.044.750	(
- 1	4. BP Lain-lain	0	0	0	(

*jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan sebesar Rp 0

II. Keadaan kas nada akhir bulan nelanoran

n. Readaan kas pada akiin bulan pelaporan		
Uang Tunai di brankas	Rp.	0
Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening)	Rp.	0 (+)
3. Jumlah kas	Rp.	0
III. Selisih Kas		· ·
1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	. 0
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0 (-)
3. Selisih Kas	Rp.	0
IV. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA		U
1. Saldo UP	Rp.	0
2. Kuitansi UP	Rp.	0 (+)
3. Jumlah UP	Rp.	0
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0 (-)
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0
V Panialsean calicib kas danlatau calicib nambuluse (see the	10000	U

V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada):

- 1. -- Tidak Ada --
- 2. -- Tidak Ada --

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran /

trappes lows

PPK atas nama KPA

Wahyu Pryono

NIP. 197006011991031002

KOTA MATARAM, 31-12-2017

ara Pengeluaran,

*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 890615

BULAN: DESEMBER 2017

No.	Nomor Rekening	Nama Pakanina	Nama Bank	Kode	Surat Izin		0.11	
NO.	. Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Rek.**	Nomor	Tanggal	Saldo	
1	0369530256	Bpg 038 BPK Perwakilan provinsi NTB	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20	S-205/WPB.22/KP.0 130/2015	21-01-2015		0,00

Bendahara Pengeluaran,

 ^{*} Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara
 ** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya

LAPORAN SALDO REKENING BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BULAN: DESEMBER 2017

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode	Surat Izir	1	Tanggal Transaksi	Calda	
				Rek.**	Nomor	Tanggal	Terakhir	Saldo	Keterangan
	0369530256	Bpg 038 BPK Perwakilan provinsi NTB	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20	S-205/WPB.22/KP.0 130/2015	21-01-2015	31-12-2017	0	

Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara
 Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya

Bendahara Pengeluaran,

Anita Noviana

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Minggu Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Tujuh Belas, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir , dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 0 dan nomor bukti terakhir: K00347

Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut:

I	Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :					
	A. Saldo Kas Bendahara					
	1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.		0		
	2. Saldo BP BPP	Rp.		(
	3. Saldo BP Uang Muka (Voucher)	Rp.		0		
	4. Jumlah (A.1 + A.2 + A.3)		Rp.		0	
	B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari:					
	1. Saldo BP UP	Rp.		0	*	
	2. Saldo BP LS-Bendahara	Rp.		0		
	3. Saldo BP Pajak	Rp.		0		
	4. Saldo BP Lain-lain	Rp.		0		
	5. Jumlah $(B.1 + B.2 + B.3 + B.4)$		Rp.		0	
	C. Selisih Pembukuan (A.4 - B.5)				Rp.	0
II	Hasil Pemeriksaan Kas:					
	A. Kas yang Dikuasai Bendahara:					
	1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.			0	
	2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.			0	
	3. Jumlah Kas (A.1 + A.2)		Rp.		C	
	B. Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3)			1	Rp.	0
III	Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAK	PA):				
	A. Pembukuan UP Menurut Bendahara:					
	1. Saldo UP	Rp.		0		
	2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	Rp.		0		
	3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2)		Rp.		0	
	B. Pembukuan UP menurut UAKPA		Rp.		0	
	C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKP	A (A3 - B)			Rp.	0
IV	Penjelasan atas selisih				0	

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

A. Selisih Kas (II.B)

Yang diperiksa

Bendahara Pengeluaran

Anita Noviana

NIP. 199011122010022001

31-12-2017

Yang memeriksa

KPA atau PPK atas nama KPA

Wahyu Priyono

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Ulang Tanggal 08-01-2018

Kode Satker: 890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

0	KPPN		TGL BUKU	NAMA	NTPN-NTB	AKUN	MATA UANG	JML SETOR	KETERANGAN
			11-12-2017	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	C9E5075IKB8J4K49 - 000000566389	411121	IDR	80.000	Sudah dikonfirmasi di KPPN MATARAM pada tanggal 08-01-2018
1	KHUSUS PENERIMAAN	0200000000	14-12-2017	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	D0D625PV0Q2TDDN9 - 000000049765	411121	IDR	543.750	Sudah dikonfirmasi di KPPN MATARAM pada tanggal 08-01-2018
2	KHUSUS PENERIMAAN		08-12-2017	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	914086K08IIJ2J49 - 000000779236	411121	IDR	98.000	Sudah dikonfirmasi di KPPN MATARAM pada tanggal 08-01-2018
3	KHUSUS PENERIMAAN	520009000990	12-12-2017	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	41F4F1V3LF27H169 - 000000141653	411121	IDR	80.000	Sudah dikonfirmasi di KPPN MATARAM pada tanggal 08-01-2018
4	KHUSUS PENERIMAAN	520009000990	11-12-2017	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	ABBFF4367T76Q0DG - 964901461602	411121	IDR	107.000	Sudah dikonfirmasi di KPPN MATARAM pada tanggal 08-01-2018
5	KHUSUS PENERIMAAN	550000513990	11-12-2017	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	77D7D7ULJHAVKHDP - 000000201941	411121	IDR	89.000	Sudah dikonfirmasi di KPPN MATARAM pada tanggal 08-01-2018
6	KHUSUS PENERIMAAN	520009000990	12-12-2017	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	6BF952SV4PA1C169 - 000000410520	411121	IDR	74.000	Sudah dikonfirmasi di KPPN MATARAM pada tanggal 08-01-2018
7	KHUSUS PENERIMAAN	520009000990	12-12-2017	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	DDF902EFMTSLEE69 - 000000158596	411121	IDR	107.000	Sudah dikonfirmasi di KPPN MATARAN pada tanggal 08-01-2018
8	KHUSUS PENERIMAAN	520009000990	12-12-2017	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	E13151LSCT68MO69 - 000000559786	411121	IDR	89.000	Sudah dikonfirmasi di KPPN MATARAN pada tanggal 08-01-2018
9	KHUSUS PENERIMAAN	520009000990		BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	A88E01G4UUNRPG40 - 951666169431	411121	IDR	167.000	Sudah dikonfirmasi di KPPN MATARAN pada tanggal 08-01-2018
10	I have been a second		3-2-1-	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	511F38FMOUN2C7DP - 000000324513	411121	IDR	80.000	Sudah dikonfirmasi di KPPN MATARAN pada tanggal 08-01-2018
11				BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	6FF9907TJKSJTJDP - 000000742881	411121	IDR	80.000	Sudah dikonfirmasi di KPPN MATARAN pada tanggal 08-01-2018
12	100000000000000000000000000000000000000				0EA906M0SVLKRJA9 - 000000583098	411124	4 IDR	450.000	Sudah dikonfirmasi di KPPN MATARAN pada tanggal 08-01-2018
13	KHUSUS PENERIMAAN	520009000990	20-12-2017	TOTAL		1	1	2.044.750	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara KANTOR PELAYIMAN

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Ulang Tanggal 08-01-2018

MAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dian Setyo C NIP 198405242003121005

DATA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Satker 890615 BPK Perwakilan Provinsi NTB

10	KODE NTPN	KODE NTB	KODE AKUN	JUMLAH
1	C9E5075IKB8J4K49	000000566389	411121	80.000
2	DOD625PV0Q2TDDN9	000000049765	411121	543.750
3	914086K08IIJ2J49	000000779236	411121	98.000
4	41F4F1V3LF27H169	000000141653	411121	80.000
5	ABBFF4367T76Q0DG	964901461602	411121	107.00
6	77D7D7ULJHAVKHDP	000000201941	411121	89.00
7	6BF952SV4PA1C169	000000410520	411121	74.00
8	DDF902EFMTSLEE69	000000158596	411121	* 107.000
9	E13151LSCT68M069	000000559786	411121	89.000
10	A88E01G4UUNRPG40	951666169431	411121	167.000
11	511F38FMOUN2C7DP	000000324513	411121	80.000
12	6FF9907TJKSJTJDP	000000742881	411121	80.00
13	OEA906MOSVLKRJA9	000000583098	411124	450.000
	Jumlah Total			2.044.750

Bendahara Pengeluaran

Anida Noviana 1991 112/2010022001

CABANG : MATARAM
REKENING : GIRO TOK HIT BBB PEWERINTAH
PERIODE TGL : 01/12/2017

S/D . 31/12/2017

NO. REKENING: 0369530256 KEPADA YTH: BPg 038 EPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

MPWP . 0.542 829.5-911.000

JL UDAYANA NO 22

MATAUANG : IDR

000000 KARANG BARU

HAL: 1

Selaparang (Selaprang)

1 1575					
TRANS	URA	IAN	DEBET	EREDIT	SALDO
	SALDO	A SAI AT			50.000.000.00
05 Dec	C. Mataram	TARIN CHO CD822533 ANITA WOVIANA/G8190700	50 000 000 00-		0,00
65 Dec		ANITA NOVIANA/08190700	10204		0,00
07 Dac	Cb. Pacanon	TRANSFER DAR		12 512 606 66	12.512.000.00
07 Dec		0359530256 17038130300	ennenerge innonnegre	Reanning	48.000,000,00
97 Pec		PEMINDAHAN DARI 298474	175 8585005		
OE Dec	Cb. Pecenon	TRANSPER DAR		£ 800 000 00	17.482.000,00
08 Dec		0389330258 17032130300	2002000001 381303018	70300000	17,401,000,00
58 Dec		PEMINDAKAN DARI 29547	176 APPRING		
08 Dac	Cb. Pacanon	TRANSPER DAR		128.889.109,00	100 131 100 00
de Dec		0369530256 17039130300	1971/000000 201202000	71200000	
08 Dec		PRMINDAHAN DARI 255474	1175 RPERUNP		
08 Dec	Cb. Pacenon	TEAMSPER DAR		50.429.368,00	196 570 677 66
08 Dec		0369330238 17038130300	2712000001 301363000	73500000	
Of Dec		PENTHURNAL PART ODEATA	atte peretting		
11 Dec	C. Matazam	TARIK CMO CDC22554	46,270,477,70-		150.000.000.00
11 Dec		NITA N/0186142410			
ll Dgc	Ch. Recenon	TRANSPER DAR		8.150.000.00	158.150.000.00
li Dec		0369530256 17036130300	8002000001 301303008	90200000	
11 Dec		· 医巴姆丁特亚氏征医疗 有医原本 法有实验与证	THE DEVICENTS		
13 Dec	C. Mataram	TARIN CHO CD825535	39.150.000,00-		100.000.000.00
13 Dec		YES AN ANITA MOVIANA /O	81907002385		
13 Dec	Cb. Pedenon	TRANSFER DAR		8.718.330,00	108.718.350.00
15 Dec		0369530255 17039130300	9203000001 391303009	20500000	
15 Dec		PEMINDAKAN DARI 225474 TRANSFER DAR	176 RESEUNE		
15 Dec	Sb.Pesenen			25.759.297.00	135.517.547.00
15 Dac		0359530256 17038130300	9205000001 381303009	20500000	
15 Dec	- 41.4	PEMINDAMAN DARI 198474	175 RPKBUMP		
15 Dec 15 Dec	C.Mataram	TARIE CHO CD925556	25.327.647.00-		100.000.000.00
15 Dec		MITA N/081907002385/2	S PERIADIN		
18 Dec	war of the wall will	TELLESE DEE		20.972.126,00	180.932.125,00
18 Dec		0389330256 17038130300	9239655553 381353556	32900000	
19 Dec	C Vene	PEMINDAHAN DARI 285474	176 SPKEUNP		
19 Dec	L - 71= L 4 F 2 71	TARIE CHO CD825857	20.972.125,00-		100.000.000.00
19 Dec		ANITA N/081907002285			
19 Dec	CD.FECRACA	TRANSPER DAR		43.570.413,00	143.570.413.00
19 Dec		0369230256 17038130340	8303000001 2813030093	3030000	
ir Dec	Co Same	PEMINDAHAN DARI 295474	175 RPKODNIP		
		A THEORY DESCRIPTION OF THE PARTY.		17.200.000,00	2 22 2 1 1

CABANG : MATARAM
REKENING : GIRO TOK HIT BBB PEWERINTAH
PERIODE TGL : 01/12/2017

S/D : 31/12/2017

NO. REKENING: 0369530256 KEFADA YTH: BPg 038 BFK PERWAKILAN PROVINSI NTB

NPWP : 0.642.829.6-911.000

000000

JL UDAYANA NO 22

MATAUANG : IDR

KARANG BARU

83122

Selaparang (Selaprang)

TGL					
TRANS	URAI	A N	DEERT	KREDIT	SALDO
-	SALDO AW	TAT.			160,670,413,00
20 Dec			00002340000001 381303009	12466666	******
20 Dec		INDAHAM DARI 2864		est net 78 het net hat net 97	
20 Dec	Cb.Pacenon TP3		7	21.138.000,00	182.028.413.00
20 Dec			2009347000001 381303009		101.010.415,00
20 Dec		CINDAHAN DARI 296			
20 Dec		RIN CHO CDESSES			100.000.000.00
39 Dec	2337	TA NOVIANA/C19150	10000325		
21 Dec		ETE CHO CD02865	15.154.814.00-		83.845.065.00
21 Dec	RMI	TA NOVYANA/081901			45.442.450,40
27 Dac		IN CHO CD025660			0.00
27 Dec	3,997	TA NOVIANA/081801	000000		2,00

ARRIE DARI REKENING



LAMPIRAN 32 DAFTAR ASET YANG BERASAL DARI BELANJA BARANG TAHUN 2017

DAFTAR ASET TETAP YANG BERASAL DARI BELANJA BARANG BPK PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT PER 31 DESEMBER 2017

No			SP2D		Kapitalisasi Aset Tetap di SIMAK-BMN				
	Nomor	Tanggal	Nilai	MAK	Uraian	Nama Aset	Nilai Satuan	Kuantitas	Total
-					-				
\dashv									
-									
\dashv					-				
\Box									
\dashv					-				
\dashv					-				

Keterangan Tambahan				
1				

Petugas SAKPA

(Wulan Kurniawati) NIP. 198602082009062001 Petugas ŞIMAK-BMN

(Fahruddin)

NIP. 1986 172009011004

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum

(Mohamad Zahruddin) NIP. 196804301994031004 (Deny Winahmana) NIP. 196510131985031003



LAMPIRAN 33 DAFTAR BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISASI TAHUN 2017

DAFTAR BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISASI BPK PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT PER 31 DESEMBER 2017

No			SP2D	Pekerjaan/Kegiatan yang Tidak Dikapitalisasi			
	Nomor	Tanggal	Nilai	MAK	Uraian	Uraian	Nilai
				1			
	Ju	mlah	-			Jumlah	

Keterangan Tambahan	
1	

Petugas SAKPA

(Wulan Kurniawati)

NIP. 198602082009062001

Petugas SIMAK-BMN

(Fabruddin)

NIP. 198611172009011004

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Keuangan

(Mohamad Zahruddin) NIP. 196804301994031004 Kepala Sub Bagian Umum

(Deny Wirahmana)



LAMPIRAN 34 LAMPIRAN PENDUKUNG CaLK

KERTAS KERJA PERHITUNGAN BELANJA BARANG DIBAYAR DI MUKA BPK PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT PER 31 DESEMBER 2017

No	No. SPM/SP2D/SPK	Lokasi Gedung/R umah	Nilai Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Nilai sewa/hari	Nilai Sewa Tahun Sebelumnya (2011/2012/2014/2015/2016)	Nilai Sewa Semester I 2017	Nilai Sewa Semester II 2017	Total Nilai Sewa Tahun 2017	Sisa Nilai Sewa Tahun 2017
			(Rp)			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (9)+ (10)	(12)
											(
											C
											C
											C
											C
							4				0
											0
											0
											0

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG BUKAN PAJAK BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT PER 31 DESEMBER 2017

No	Uraian Piutang	Jumlah Piutang per 31 Desember 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Jumlah Piutang per 31 Desember 2017 (Rp)	Keterangan

KARTU PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT PER 31 DESEMBER 2017

Jenis Piutang:

			Д	gunan/Barang Sita	an		Jumlah Penyis	ihan Piutang Ti	dak Tertagih	
Nama Debitur	No dan Tanggal Spn	Saldo Piutang	Bentuk Agunan/Sitaan	Nilai Agunan/Sitaan	Nilai Agunan/Sitaan yang diperhitungkan	Kualitas Piutang	Saldo Piutang setelah Agunan/Sitaan	Persentase Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang	Keterangan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)		(Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 4 -7)	(10)	$(11 = 9 \times 10)$	(12)
	Debitur	Debitur Tanggal	Debitur Tanggal Piutang Spn (Rp)	Nama Debitur No dan Tanggal Spn Saldo Piutang Bentuk Agunan/Sitaan (Rp)	Nama Debitur No dan Tanggal Spn Saldo Piutang Bentuk Agunan/Sitaan (Rp) (Rp) (Rp)	Nama Debitur Tanggal Spn Piutang Bentuk Agunan/Sitaan (Rp) Nilai Agunan/Sitaan yang diperhitungkan (Rp) (Rp) (Rp)	Nama Debitur No dan Tanggal Spn Saldo Piutang Bentuk Agunan/Sitaan (Rp) (Rp) Nilai Agunan/Sitaan Agunan/Sitaan (Rp) (Rp) (Rp) Nilai Agunan/Sitaan yang diperhitungkan (Rp)	Nama Debitur No dan Tanggal Spn Saldo Piutang Bentuk Agunan/Sitaan (Rp) Nilai Agunan/Sitaan yang diperhitungkan (Rp) (Rp) Nilai Agunan/Sitaan yang diperhitungkan (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Saldo Piutang Saldo Piutang Setelah Agunan/Sitaan (Rp) (Rp)	Nama Debitur No dan Tanggal Spn Saldo Piutang Sentuk Agunan/Sitaan (Rp) Nilai Agunan/Sitaan (Rp) Nilai Agunan/Sitaan yang diperhitungkan (Rp) (Rp) Nilai Agunan/Sitaan yang diperhitungkan (Rp) (Rp) Nilai Agunan/Sitaan yang diperhitungkan (Rp) (Rp) (Rp) Rualitas Piutang Saldo Piutang setelah Agunan/Sitaan (Rp)	Nama Debitur Saldo Piutang Spn (Rp) Saldo Bentuk Agunan/Sitaan (Rp) (Rp) Nilai Agunan/Sitaan (Rp) Kualitas Saldo Piutang diperhitungkan (Rp) (Rp) Saldo Piutang Saldo Piut

DAFTAR PENYETORAN SALDO PIUTANG LAINNYA PER 31 DESEMBER 2017 BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT

Kode Akun	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah (Rp)
			
			+
			-
	Kode Akun	Kode Akun No. NTPN	Kode Akun No. NTPN Nama Bank

Mataram, 12 Januari 2018 Kepala Sub Bagian Keuangan

Mohamad Zahruddin NIP. 196804301994031004

KERTAS KERJA ANALISA BELANJA MODAL DAN MUTASI (PEMBELIAN + PENGEMBANGAN) BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT PER 31 DESEMBER 2017

Akun	5311	5321	5331	5361	5231	Total
Intrakomptabel						
Tanah	0	0	0	0	0	0
PM	0	0	0	0	0	0
GB	0	0	0	0	0	0
Jalan	0	0	0	0	0	0
Irigasi	0	0	0	0	0	0
Jaringan	0	0	0	0	0	0
ATL	0	0	0	0	0	0
ATR	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Lisensi	0	0	0	0	0	0
ATB Lainnya	0	0	0	0	0	0
Total Intrakomtpabel	0	0	0	0	0	0
Ektrakomptabel						
PM	0	0	0	0	0	0
GB	0	0	0	0	0	0
ATL	0	0	0	0	0	0
Total Ekstrakomtpabel	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan GB	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Lainnya	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan	0	0	0	0	0	0
Persediaan	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0
Belanja Modal	0	0	0	0	0	0
Selisih	0	0	0	0	0	0

KERTAS KERJA PEMBELIAN PERSEDIAAN BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT PER 31 DESEMBER 2017

No	No Faktur/Kuitansi	tanggal Faktur	No BAST	tanggal BAST	MAK	Nilai Faktur	Nilal Input	Selisih	Tanggal Buku	Data SAIBA	Selisih dengan SAIBA	(Dalam Rupia No SP2D
1	FT1-1701-00528	31-Jan-17	04/BAST/XIX.MTR.1.1/01/2017	31-Jan-17	521811	928.150	928.150		31-Jan-17	1.469.935		170381303000659
2	FT1-1702-00041	3-Feb-17	07/BAST/XIX.MTR.1.1/02/2017	3-Feb-17	521811	541.785	541.785		3-Feb-17	23,103,333		170381303000659
3	Pasifik	31-Jan-17	03/BAST/XIX.MTR.1.1/01/2017	31-Jan-17	521811	832.500	832.500		31-Jan-17	832.500		170381303000660
4	Gramedia	2-Feb-17	05/BAST/XIX.MTR.1.1/02/2017	2-Feb-17	521811	115.000	115.000		2-Feb-17	115.000		17038130300066
5	Pasifik	3-Feb-17	06/BAST/XIX.MTR.1.1/02/2017	3-Feb-17	521811	840.000	840.000		3-Feb-17	1.705.400	e deve	17038130300066
6	Master	30-Jan-17	02/BAST/XIX.MTR.1.1/01/2017	30-Jan-17	521811	865.400	865,400		30-Jan-17	1.705.400		17038130300066
7	Master dan Gramedia	20-Feb-17	10/BAST/XIX:MTR.1.1/02/2017	20-Feb-17	521811	1.038.000	1.038.000		20-Feb-17	1.038.000		17038130300088
8	MU-SINV-1702-0008	24-Feb-17	BAST/MTR01/1702/08	24-Feb-17	521811	14.285.000	14.285.000	-	24-Feb-17	18.128.000		17038130300111
9	MU-SINV-1702-0010	28-Feb-17	BAST/MTR01/1702/10	28-Feb-17	521811	3.843.000	3.843.000		28-Feb-17		Res Inc.	17038130200330
10	MU-SINV-1702-0009	27-Feb-17	BAST/MTR01/1702/09	27-Feb-17	521811	4.938.000	4.938.000	-	27-Feb-17	4.938.000		17038130200330
11	Master	20-Mar-17	14/BAST/XIX.MTR.1.1/03/2017	20-Mar-17	521811	718.200	718.200		20-Mar-17	718.200		17038130200330
12	Master	20-Mar-17	15/BAST/XIX.MTR.1.1/03/2017	20-Mar-17	521811	718.200	718.200	4	20-Mar-17	718.200		17038130300169
13	Gramedia	23-Feb-17	11/BAST/XIX.MTR.1.1/02/2017	23-Feb-17	521811	688.000	688.000		23-Feb-17	1.581.500		17038130300169
14	Master	20-Mar-17	16/BAST/XIX.MTR.1.1/03/2017	20-Mar-17	521811	772.100	772.100		20-Mar-17			17038130300169
15	Niaga	10-Apr-17	18/BAST/XIX.MTR.1.1/04/2017	10-Apr-17	521811	121.400	121.400		12-Apr-17	12702502		17038130300169
16		6-Feb-17	09/BAST/XIX.MTR.1.1/02/2017	6-Feb-17	521811	805.000	805.000	-	6-Feb-17	805.000		17038130300169
17	MU-SINV-1704-0002	20-Apr-17	BAST/MTR01/1704/02	20-Apr-17	521811	9.332.000	9.332.000		21-Apr-17	9.332.000		
18	MU-SINV-1706-0001	2-Jun-17	BAST/MTR01/1706/01	2-Jun-17	521811	8.038.000	8.038.000	-	2-Jun-17	8.038.000		170381303002630
19	MU-SINV-1706-0004	6-Jun-17	BAST/MTR01/1706/04	6-Jun-17	521811	1.404.000	1,404,000		6-Jun-17	1.404.000		170381303003482
20	Gramedia	1-Aug-17	24/BAST/XIX.MTR.1.1/08/2017	1-Aug-17	521811	846.000	846.000		1-Aug-17	1.418.500		17038130300548
21	Master	3-Aug-17	25/BAST/XIX.MTR.1.1/08/2017	3-Aug-17	521811	405.800	405.800		3-Aug-17		TOTAL STREET	17038130300503
22	Gramedia	3-Aug-17	26/BAST/XIX.MTR.1.1/08/2017	3-Aug-17	521811	166.700	166,700		3-Aug-17			
23	Master	11-Aug-17	30/BAST/XIX.MTR.1.1/08/2017	11-Aug-17	521811	108,300	108.300		11-Aug-17	108.300		170381303005037 170381303005478
24	Master	06-Okt-17	39/BAST/XIX.MTR.1.1/10/2017	06-Okt-17	521811	980.200	980.200		24-Okt-17	980.200		
25	SINV-171016-0008	16-Okt-17	40/BAST/XIX.MTR.1.1/10/2017	16-Okt-17	521811	900.000	900.000		24-Okt-17	3.444.500		170381303007546
26	SINV-171017-0001	17-Okt-17	41/BAST/XIX.MTR.1.1/10/2017	17-Okt-17	521811	900,000	900.000		24-Okt-17	311111300		170381303007545
27	Gramedia	04-Okt-17	36a/BAST/XIX.MTR.1.1/10/2017	06-Okt-17	521811	674.500	674.500		06-Okt-17	0-3-4418-403-0		170381303007545
28	Toko Bahagia	23-Okt-17	44/BAST/XIX.MTR.1.1/10/2017	23-Okt-17	521811	970.000	970.000		24-Okt-17			170381303007545
29	Toko Bahagia	28-Sep-17	35/BAST/XIX.MTR.1.1/09/2017	28-Sep-17	521811	937.500	937.500		24-Okt-17	2.495.000		170381303007545
30	PJR-SINV-1710-0045	04-Okt-17	38/BAST/XIX.MTR.1.1/10/2017	04-Okt-17	521811	800.000	800.000	-	24-Okt-17	2.433.000	*	170381303007547
31	Gramedia	23-Okt-17	45/BAST/XIX.MTR.1.1/10/2017	23-Okt-17	521811	757.500	757.500	A	24-Okt-17			170381303007547 170381303007547
32	Toko Bahagia	24-Okt-17	47/BAST/XIX.MTR.1.1/10/2017	24-Okt-17	521811	560.000	560.000	-	24-Okt-17	560.000		170381303007543
33	CV. Zawa Agung Ciptakarya	23-Oct-17	55/BAST/XIX.MTR.1.1/11/2017	14-Nov-17	521811	8.140.000	8.140.000		15-Nov-17	11.158.000	2012	170381303008715
34	SINV-171128-0018	28-Nov-17	BAST/MTR409/1711/03	28-Nov-17	521811	3.018.000	3.018.000		4-Dec-17			170381303008715
35	SINV-171215-0007	15-Dec-17	BAST/MTR409/1712/01	15-Dec-17	521811	1.950.000	1.950.000		15-Dec-17	1.950.000		170381701000866
						72.938.235	72.938.235		-	72.938.235		

Petugas Pegelola Persediaan

Adhitya Megananda NIP. 198702152011051001 Kepala Subbagian Umu

Deny Wirahmana

STATUS TANAH BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT PER 31 DESEMBER 2017

	N			Buk	ti Kepemili	kan Tanah	
No	Nama Barang dan Peruntukkan	Lokasi/Alamat	Atas Nama	Nomor	Tanggal	Luas	Tahun Perolehan
	-						

DAFTAR PEMBAYARAN ATAS SALDO BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR PER 31 DESEMBER 2016 DAN PER 31 DESEMBER 2017 ESELON I PUSAT

NO	URAIAN	NO.SPM/SP2D	JUMLAH
-			
-			

DAFTAR BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR PER 31 DESEMBER 2017 ESELON I PUSAT

NO	URAIAN	NO.SPM/SP2D	JUMLAH
_			
+	_		

DAFTAR BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR PER 31 DESEMBER 2017 ESELON I PUSAT

NO	URAIAN	BUKTI	JUMLAH

KERTAS KERJA PERHITUNGAN PENDAPATAN SEWA DITERIMA DI MUKA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT PER 31 DESEMBER 2017

No	No. Kontrak Sewa	Lokasi Gedung/R umah		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Nilai sewa/hari	Nilai Sewa Tahun Sebelumnya (2011/2012/2014/2015/2016)	Semester I 2017	Nilai Sewa Semester II 2017	Total Nilai Sewa Tahun 2017	Sisa Nilai Sewa Tahun 2017 (Pendapatan Diterima di Muka)
			(Rp)			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (9)+ (10)	(12)
											(

DAFTAR PEMBAYARAN ATAS SALDO BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR PER 31 DESEMBER 2016 DAN PER 31 DESEMBER 2017 ESELON I PUSAT

NO	URAIAN	NO.SPM/SP2D	JUMLAH